LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Pemerintah Kabupaten Madiun dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Madiun (LKjIP) Tahun 2018, sebagai perwujudan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini merupakan pelaporan kinerja di tahun kelima RPJMD Perubahan Kabupaten Madiun 2013-2018, dan sebagai wujud pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Madiun tentang manajemen kinerja kepada pemerintah pusat, disamping sebagai suatu pemenuhan kewajiban sebagaimana diamanatkandalam Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ucapan terimakasih disampaikan berkat dukungan para Pemangku kepentingan, yaitu para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta Staf, Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Kami menyadari bahwa LKjIP ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami terus berupaya untuk meningkatkan kualitasnya baik dalam penyajian maupun substansi kinerja di tahun-tahun mendatang

Selanjutnya kami berharap semoga LKjIP Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, bermanfaat khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Madiun dalam upaya untuk melakukan peningkatan kinerja atas komitmen kinerja yang telah ditetapkan. Sehingga tujuan yang telah dicanangkanakan segera terwujud demi kemakmuran seluruh rakyat.

Madiun , Maret 2019

BUPATI MADIUN

H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos

DAFTAR ISI

			Halaman
KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			iii
IKTISAR EKSEKUTIF			iv
BAB I	:	**PENDAHULUAN**	
		A. Latar Belakang	1
		B. Gambaran Umum Organisasi	3
		C. Dasar Hukum	12
		D. Sistematika Penyusunan	13
BAB II	:	**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**	
		A. Rencana Strategis	14
		1. Visi	14
		2. Misi	15
		B. Tujuan dan Sasaran	16
		C. Indikator Kinerja	18
		D. Penetapan Kinerja	20
BAB III	:	**AKUNTABILITAS KINERJA**	
		A. Capaian Kinerja Organisasi	21
		B. Realisasi Anggaran	88
		C. Prestasi Kabupaten Madiun	90
BAB IV	:	**PENUTUP**	
		Berisi tentang kaidah pelaksanaan pemerintahan	93

IKTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Madiun dalam menjalankan fungsi dan urusan yang menjadi kewenangannya, senantiasa berusaha untuk meningkatkan kinerja secara profesional dan proporsional. Salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kinerjanya tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018.

RPJMD 2013-2018 yang telah berjalan kemudian dilaksanakan reviu pada 2017, serta ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018. Perubahan yang dilaksanakan sebagai wujud keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dalam menyempurnakan, menindak lanjuti, dan meningkatkan Kinerja Pemerintah Kabupaten Madiun. Selanjutnya ditetapkan pula Indikator Kinerja Utama. Berdasarkan RPJMD yang telah tersusun tersebut diharapkan telah tergambar rencana kinerja yang ingin dicapai dalam jangka menengah.

Penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2018 adalah bagian dari penggalan perjalanan rencana jangka menengah daerah. Berdasarkan sasaran di dalam RPJMD yang ingin dicapai pada tahun 2018, disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang kemudian akan dijabarkan oleh satuan kerja yang terkait kedalam rencana kerja (RENJA). Agar rencana kerja bisa dioperasionalkan maka oleh satuan kerja pelaksana, disusun rencana kerja dan anggaran yang tertuang dalam APBD tahun 2018.

Laporan Kinerja disusun sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu informasi yang disajikan bukan hanya berisi tentang keberhasilan – keberhasilan yang telah dicapai tetapi juga memuat kekurangan – kekurangan yang masih di jumpai sehingga dapat dirumuskan solusi perbaikan dimasa mendatang. Dengan demikian diharapkan segenap stakeholder Pemerintah Kabupaten dapat secara bersama-sama memberikan masukan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di KabupatenMadiun. Keberhasilan dan kekurangan tersebut terumuskan dalam pengukuran pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Analisa ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa tahun 2013 adalah berada pada periode transisi RPJMD dan adanya review terhadap Indikator Kinerja tama Daerah melalui Surat keputusan Bupati Nomor 9 tahun 2014 serta hasil review terhadap RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2017.

Dari 36 indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Madiun, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 25 IKU memenuhi kriteria berkinerja tercapai target 100% atau melampaui target 100%, dan 11 IKU memenuhi kriteria berkinerja tidak dapat mencapai target 100 % yang terbagi atas 3 (tiga) IKU capaian kinerjanya dibawah 90% dan lebih dari 50%, serta 8 (delapan) IKU capaian kinerja lebih 90%.

Dengan melihat kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Madiun ke depan. *Pertama*, Terdapat beberapa IKU yang tidak mencapai target 100% dan beberapa IKU telah mencapai target 100%. Walaupun beberapa IKU telah mencapai target 100% tetapi persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan di sektor pertanian, kesehatan, pendidikan, perekonomian hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran Pemerintah Kabupaten Madiun diperlukan untuk memastikan tercapainya seluruh indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Madiun. *Kedua*, hal ini juga bisa diartikan, pentingnya koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Madiun dengan berbagai unsur *stakeholder* di lingkup Pemerintah Kabupaten.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), oleh karena itu dibutuhkan keselarasan antara proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja yang terukur, obyektif dan akuntabel.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah diminta untuk menyampaikan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)** kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Bertitik tolak dari RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2013 – 2018, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta memperhatikan Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator sasaran.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Madiun. Esensi dari Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas yang merupakan pijakan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam mempertanggung jawabkan pelaksanaan visi dan misi Kabupaten Madiun.

Dengan demikian Laporan Kinerja Kabupaten Madiun menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Bupati kepada Presiden, yang telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2018 yaitu tahun kelima RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2013 – 2018.

B. GAMBARAN UMUM KABUPATEN MADIUN

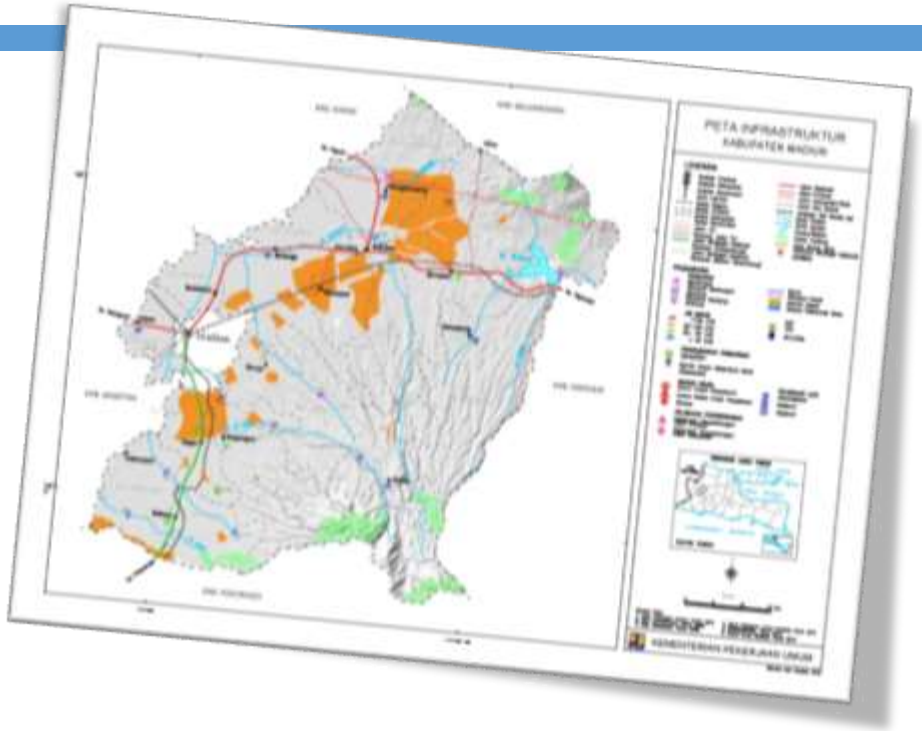

1. KONDISI GEOGRAFIS

Luas wilayah Kabupaten Madiun 1.010,86 Km^2 atau 101,086 Ha. Secara Astronomis terletak pada $111^0$25'45" – $111^{051''}$51' Bujur Timur dan 07^0 12' –7^0 48'30" Lintang Selatan, dengan batas wilayah Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara :Kab. Bojonegoro
- Sebelah Selatan :Kab. Ponorogo
- Sebelah Barat :Kab. Magetan &Kab. Ngawi
- SebelahTimur :Kab.Nganjuk

2. KONDISI DEMOGRAFIS

Jumlah penduduk pada tahun 2010 sampai dengan 2016 dengan peningkatan sebesar 2,15% yaitu dari 663.476 jiwa tahun 2010 menjadi 677.993 jiwa pada tahun 2016. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk khusus dari tahun 2016 sampai dengan 2017 terjadi peningkatan sebesar 0,28% yang semula 677.993 jiwa tahun 2016 menjadi 679.888 jiwa pada tahun 2017. Jumlah penduduk yang ditampilkan merupakan hasil dari Proyeksi jumlah penduduk Indonesia 2010 sampai dengan 2035 dalam *Kabupaten Madiun dalam angka 2018*.

Adapun komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin terbanyak adalah perempuan yaitu sebanyak 344.300 jiwa, sedangkan laki-laki sebanyak 335.588 jiwa. Apabila dilihat dari persebaran penduduk maka kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Saradan dengan jumlah penduduk 63.622 jiwa.

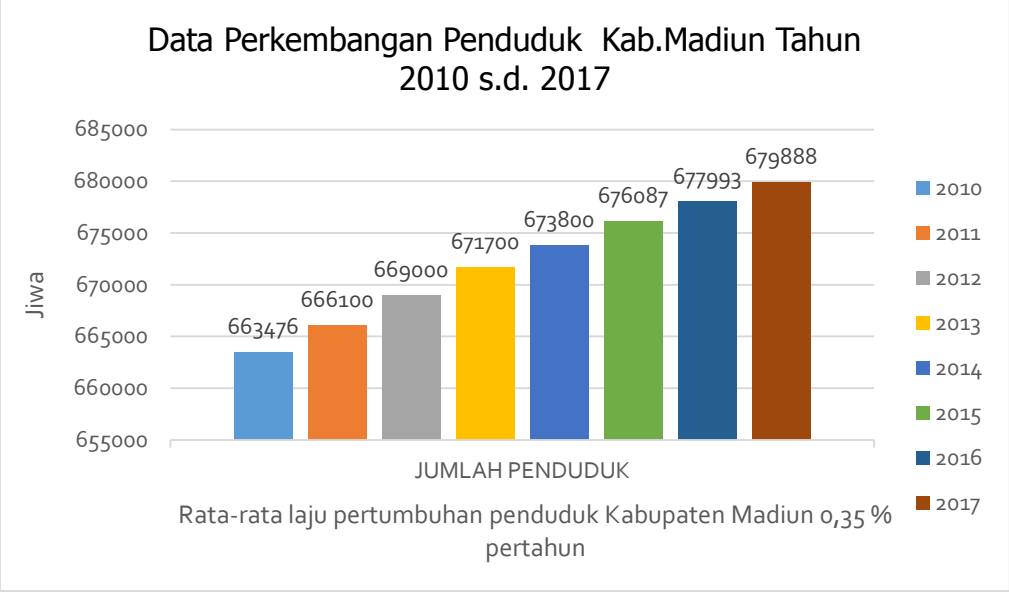

Sumber Data: Kabupaten Madiun dalam Angka 2018

3. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DI KABUPATEN MADIUN

a. **Perlunya peningkatan kualitas sumberdaya manusia atau peningkatan kesejahteraan masyarakat (IPM).**

Pembangunan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas skehidupan demi terciptanya masyarakat yang makmur dan sejahtera. Pemerintah Kabupaten Madiun terus melakukan pembangunan di segala aspek baik aspek pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan salah satu indikator yang bisa digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Madiun, meningkat dari tahun ketahun. Adapun Tabel perkembangan IPM di Kabupaten Madiun dibandingkan dengan IPM Provinsi Jawa Timur tahun 2010 s/d 2017 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	IPM Kab. Madiun	64,87	65,98	67,32	68,07	68,60	69,39	69,67	70,27
2	IPM Jawa Timur	65,36	66,06	66,74	67,55	68,14	68,95	69,74	70,27

Sumber data: Kabupaten Madiun Dalam Angka 2018

Berdasarkan Tabel di atas, perkembangan IPM di Kabupaten Madiun berada sama dengan IPM Provinsi Jawa Timur tahun 2010 s/d 2017, sebesar 70,27.

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Total Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Madiun atas dasar harga pasar tahun 2017 senilai lebih dari 16,4 triliun rupiah. Ini berarti seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Madiun pada tahun 2017 bernilai lebih dari 16,4 triliun rupiah. Nilai ini dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada tahun 2017. Angka ini masih didominasi oleh sektor pertanian (31,63 %), kemudian disusul oleh sektor konstruksi (16,12%), serta sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (12,92%) dan sektor industri pengolahan (10,12%). Sedangkan sektor dengan sumbangan paling kecil adalah pengadaan listrik dan gas (0,09%). Data tersebut ditampilkan dari Kabupaten Madiun dalam angka 2018. Dominasi sektoral PDRB Kabupaten Madiun dari tahun-ketahun berada pada sektor pertanian. Hal ini menggambarkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Madiun merupakan struktur ekonomi agraris, sehingga dalam menunjang pertumbuhan ekonomi relatif lambat.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun Tahun 2011 sebesar 6,41 kemudian menjadi pada 6,43 tahun 2012 dan pada tahun 2013 sebesar 6,37 dan pada tahun 2014 sebesar 6,51 serta pada tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar 6,53 dan 6,54.

Berikut ini adalah diagram pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun tahun 2011 s/d 2016 :

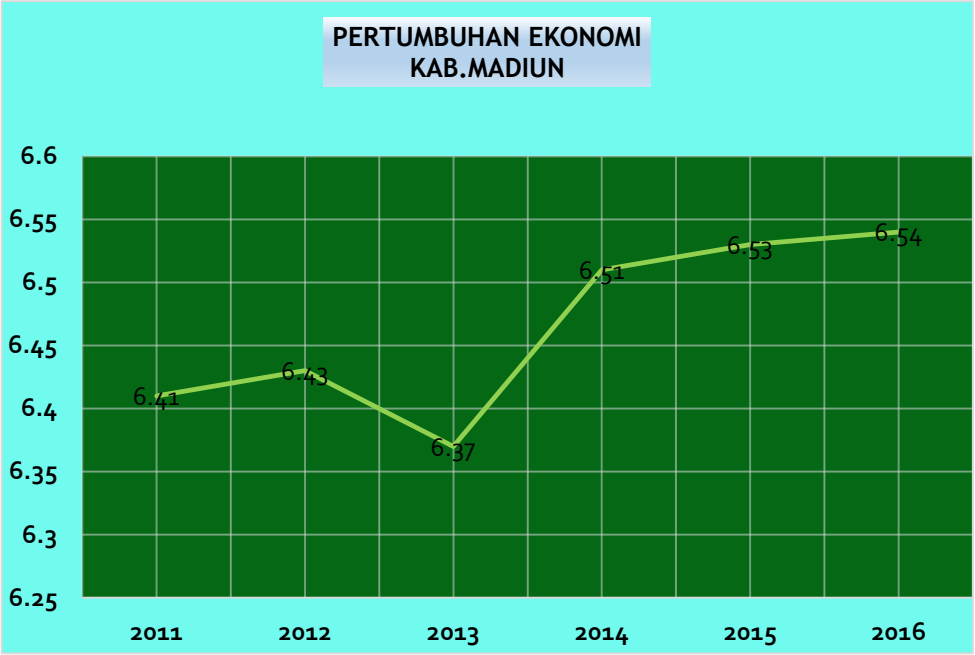

Sumber data: Kabupaten Madiun Dalam Angka 2017

Dengan melihat diagram diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Madiun mengalami peningkatan, namun apabila dikaitkan dengan laju pertumbuhan masing-masing tahun masih perlu dipacu lebih cepat.

c. Peningkatan Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah Produk Domestik Regional Brotto (PDRB) perkapita, pada tahun 2016 sebesar 22,46 juta rupiah. Angka ini meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 20,52 juta rupiah. Angka ini masih dipengaruhi oleh angka inflasi karena menggunakan harga yang berlaku.

Berikut ini tabel Pendapatan perkapita Kabupaten Madiun dibandingkan pendapatan perkapita Provinsi Jawa Timur :

Tabel: Pendapatan Perkapita Kab.Madiun dan Provinsi Jawa Timur
Tahun 2009 s/d 2016

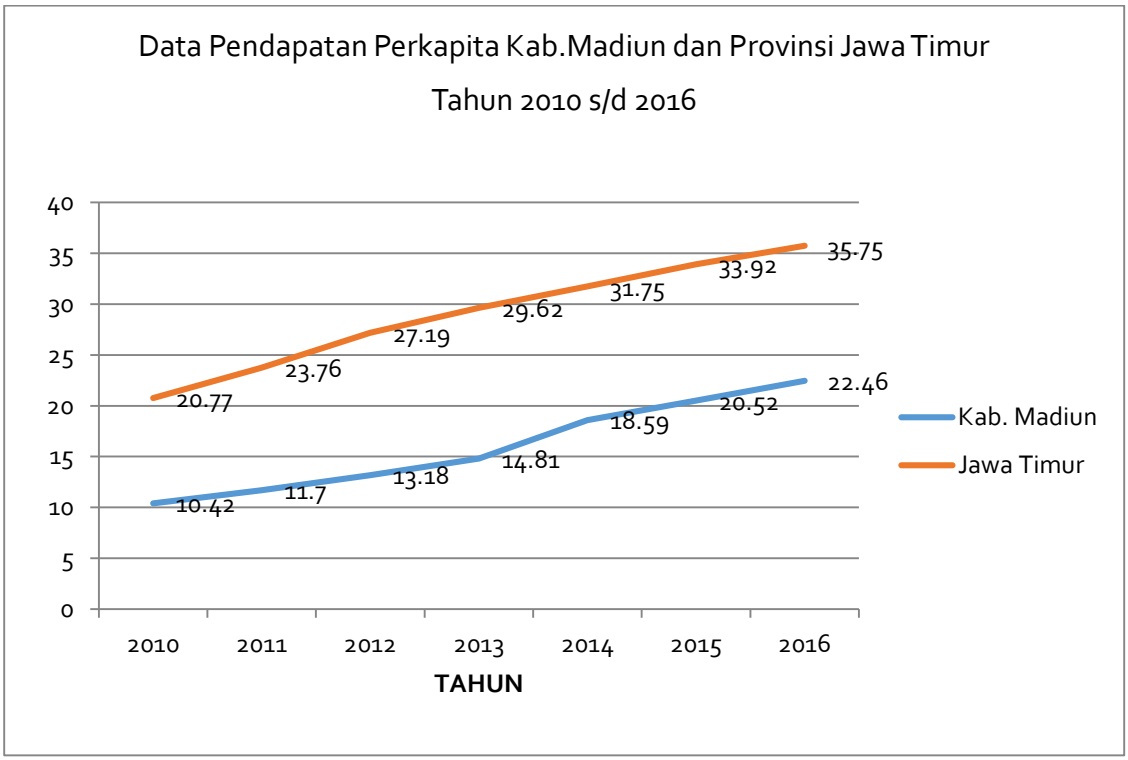

Sumber data: Kabupaten Madiun Dalam Angka 2017

d. Perluasan Lapangan Kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) pada tahun 2012 mencapai 4,16% dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 4,63%. Pada tahun 2014 terjadi penurunan menjadi 3,38%, dan pada tahun 2015 tidak terjadi perubahan tetap pada 6,99% serta pada tahun 2016 terjadi kenaikan menjadi 6,86 %, pada tahun 2017 turun mencapai 3,19% dan pada tahun 2018 mencapai 3,81%. Capaian TPT tersebut sangat dipengaruhi oleh :

- Jumlah penduduk usia kerja (15 Tahun keatas)
- Jumlah pencari kerja yang telah ditempatkan.
- Adanya peluang lapangan pekerjaan di Kabupaten Madiun (ekonomi kreatif)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Madiun Tahun 2013 s/d 2018 dapat dilihat dalam di bawah :

Tabel: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Madiun tahun 2013 s/d 2016

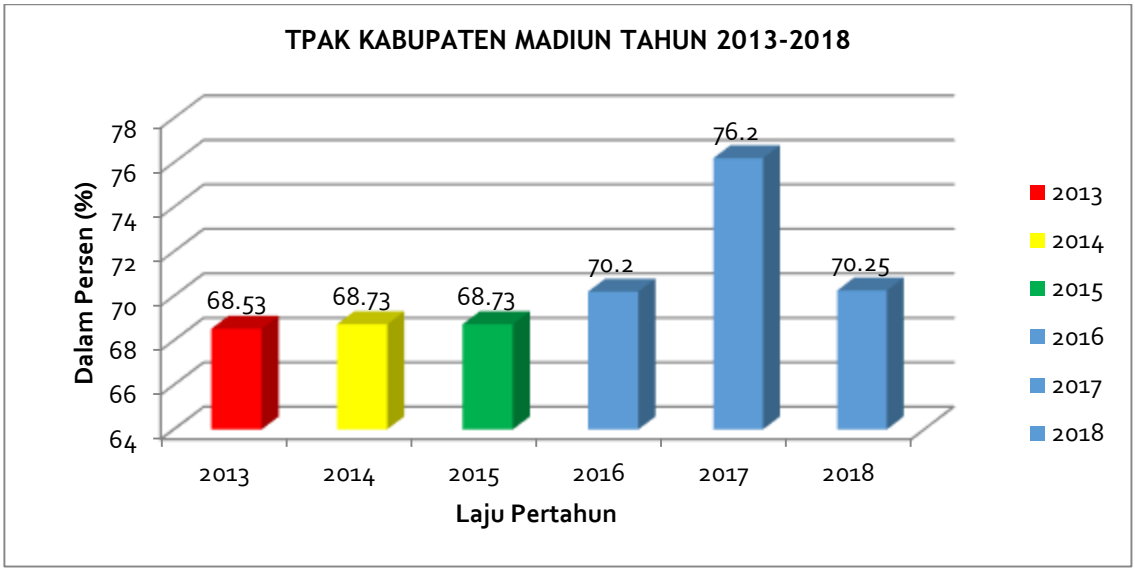

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun 2019.

Berdasarkan Diagram di atas Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%) mengalami peningkatan yang semula 68,53 pada tahun 2014, meningkat menjadi 68,73 pada tahun 2015 meningkat menjadi 70,2 pada tahun 2016, meningkat menjadi 76,2 pada tahun 2017, menurun menjadi 70,25 pada tahun 2018. Sehingga perlu upaya-upaya melalui penyediaan lapangan kerja dalam rangka menekan angka

pengangguran sekecil mungkin.

e. Perlunya menekan angka kemiskinan

Berbagai bantuan bagi masyarakat miskin melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan bahan pangan pokok, rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta berbagai hal lainnya merupakan cermin dari kontribusi APBD terhadap penanganan masyarakat miskin, meskipun dengan keterbatasan APBD yang belum mampu menangani permasalahan kemiskinanan secara menyeluruh. Walaupun demikian Kebijakan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam menekan angka kemiskinan dari beberapa tahun terakhir memiliki perkembangan yang fluktual, dibuktikan dengan persentase penduduk miskin yang semula 13,7 % pada tahun 2012, menjadi 12,45 % pada tahun 2013, menjadi 12,04 % pada tahun 2014, menjadi 12,54 % pada tahun 2015, menjadi 12,69 % pada tahun 2016, menjadi 12,28 % pada tahun 2017 sebagaimana data berikut:

Tabel: Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Madiun, 2012-2017

Tahun *Years*	**Garis Kemiskinan** *Poverty Line (Rupiah)*	**Penduduk Miskin** *Number of Poor People*	
		Jumlah *Total*	**Persentase (%)** *Percentage*
(1)	(2)	(3)	(4)
2012	240.798	91.779	13,70
2013	256.567	83.698	12,45
2014	265.310	81.200	12,04
2015	277.092	84.749	12,54
2016	294.451	85,975	12,69
2017	306.769	83,43	12,28

Sumber data: Kabupaten Madiun Dalam Angka 2018

f. Sektor pertanian sebagai tumpuan ekonomi rakyat

Kontribusi PDRB Kabupaten Madiun yang tertinggi berasal dari sektor pertanian, tetapi perlu sekali ditopang dari sektor selain pertanian yaitu sektor industri, perdagangan dan jasa serta pariwisata. Kabupaten Madiun mampu meningkatkan surplus pangan dari 246.109,52 ton pada tahun 2015 menjadi 536,151 ton pada tahun 2016.

g. Peningkatan daya saing daerah

Meningkatkan kapasitas daerah perlu dilakukan secara berkelanjutan dalam kerangka meningkatkan ruang pengembangan untuk lebih sejahtera serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengembangan infrastruktur dapat meningkatkan kapasitas ruang pengembangan ekonomi dan sosial. Sedangkan kemajuan desa dapat menambah kapasitas daya saing bagi pengembangan industri skala besar.

h. Membangun pemerintahan demokratis dan terpercaya.

Peningkatan kapasitas birokrasi berperan penting dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat dan fungsi motor penggerak pembangunan (motivator danfasilitor).

Kualitas birokrasi menentukan kualitas pembangunan. Karena revitalisasi dan optimalisasi birokrasi perlu dilanjutkan, utamanya aspek kesisteman yang bersinergi dengan sistem pembangunan yang berorientasi pada visi.

4. KONDISI PEMERINTAHAN

a. Kondisi Pemerintahan

Untuk melaksanakan tugas pokok,fungsi, susunan organisasi dan tatakerja ,yang selaras dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Kabupaten Madiun menerbitkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun. Dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun dicabut.

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Susunan organisasi pemerintahan yang terbentuk adalah sebagai berikut:

SEKRETARIAT DAERAH :

Sekretaris Daerah, 3 Staf Ahli, 3 Asisten

a. Bagian Administrasi Pemerintahan
b. Bagian Kesejahteraan Rakyat
c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
d. Bagian Administrasi Pembangunan
e. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
f. Bagian Perlengkapan.
g. Bagian Organisasi
h. Bagian Hukum
i. Bagian Umum

b. Nomenklatur SKPD Dinas dan Lembaga Teknis.

LEMBAGA TEKNIS:

a. Sekretariat DPRD
b. Inspektorat;
c. Badan Kepegawaian Daerah;
d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
f. Badan Pendapatan Daerah;
g. Rumah Sakit Umum Daerah;
h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

DINAS:

a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Komunikasi dan Informatika;
d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
f. Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu;
g. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
h. Dinas Perhubungan;
i. Dinas Pertanian dan Perikanan;
j. Dinas Perumahan dan Kawasan Permikiman;
k. Dinas Sosial;
l. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
m. Perpustakaan dan Kerasipan;
n. Dinas Tenaga Kerja;
o. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;
p. Dinas Ketahanan Pangan;
q. Dinas Lingkungan Hidup;
r. Dinas Pengendalian Pendudk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
s. Satuan Polisi Pamong Praja;

Pemerintah Kabupaten Madiun memiliki kapasitas SDM dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Per Desember 2018. Jumlah pegawai di Kabupaten pada tahun 2018 adalah 7.257 dengan komposisi sebagai berikut :

1.	**Menurut Golongan**		
	Golongan IV	2.789	Orang
	Golongan III	3.031	Orang
	Golongan II	1.297	Orang
	Golongan I	140	Orang
Jumlah		7.257	Orang
2.	**Menurut Tingkat Pendidikan**		
	Lulusan SD	55	Orang
	Lulusan SLTP	195	Orang
	Lulusan SLTA	1.327	Orang
	Lulusan Diploma	1.030	Orang
	Lulusan S-1	4.370	Orang
	Lulusan S-2	280	Orang
	Lainnya	-	Orang
	Jumlah	7.257	Orang

Sumber data: BKD 31 Desember 2018

Dengan melihat data di atas dapat diketahui bahwa apabila dilihat dari komposisi golongan, maka PNS dengan komposisi terbesar adalah golongan IV yaitu sejumlah 2.789 orang dan komposisi yang terkecil adalah golongan I yaitu sejumlah 140 orang, apabila dilihat dari tingkat pendidikan maka dapat diketahui bahwa PNS dengan Tingkat pendidikan S-1 yang terbanyak jumlahnya yaitu 4.370 orang, sedangkan jumlah yang terkecil adalah PNS dengan tingkat pendidikan SD yaitu 55 orang. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi jenjang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Madiun memiliki keragaman sumberdaya manusia yang baik.

C. DASAR HUKUM

Dasar Hukum dalam penyusunan LKjIP Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2015 ;
f. Tap MPR RI Nomor : XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusidan Nepotisme ;
g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
i. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
l. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun;
m. Peraturan Bupati Madiun Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penerapan Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018, berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Bab I : **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang
B. Maksud danTujuan
C. Gambaran Umum
D. Dasar Hukum
E. Sistematika

Bab II : **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

A. Rencana Strategis
   1. Visi
   2. Misi
   3. Tujuan dan sasaran
   4. Indikator Kinerja
B. Penetapan Kinerja Tahun 2018

Bab III : **AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Madiun
B. Realisasi Anggaran 2018

Bab IV : **PENUTUP**

Berisi tentang kaidah pemerintahan

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

A.1 VISI

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2017 merupakan pengukuran tahun keempat dari RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018.

RPJMD merupakan acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Pemerintah Kabupaten Madiun dan perangkat daerah dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2013 – 2018.

Adapun Visi Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018 adalah :

"KABUPATEN MADIUN LEBIH SEJAHTERA TAHUN 2018"

Visi tersebut sejalan dengan visi yang ada dalam RPJPD Kabupaten Madiun 2005-2025, yakni: "Kabupaten Madiun Yang Maju, Berbasis Agro Menuju Sejahtera". Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Kabupaten Madiun Maju mengandalkan potensi lokal (pertanian) yang memang menjadi basis dan riil menopang tata kehidupan sebagian besar masyarakat Kabupaten Madiun.

A.2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut Pemerintah Kabupaten Madiun mempunyai 4 (empat) misi sebagaimana tersebut dalam diagram di bawah ini:

A.3 TUJUAN

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut :

Misi I	Tujuan	Terwujudnya pertanian maju berbasis petani berdaulat sehingga dapat menggerakkan perdagangan, industri dan jasa serta berkembangnya UMKM
Misi II	Tujuan	Meningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis ketahanan sosial dan ketahanan keluarga, sehingga masyarakat dapat meningkatkan fungsi sosial ekonomi secara layak dan bermartabat serta dapat memutus mata rantai kemiskinan berbasis kemandirian.
Misi III	Tujuan	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (*human resources*), sehingga dapat meningkatan daya saing daerah melalui optimalisasi perkembangan sektoral dengan di dukung infrastruktur pembangunan yang memadai dan Mengembangkan Iklim Investasi Dunia Usaha yang kondusif serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
Misi IV	Tujuan	Meningkatkan Kualitas SDM birokrasi dan menyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan terpercaya, dalam sistem yang akuntabel, transparan, responsif dan akomodatif terhadap masalah dan tantangan serta meningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

A.4. SASARAN

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapaian atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

Sasaran MISI 1 :

1. Meningkatnya kuantitas dan Kualitas produksi pertanian;
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produksi perikanan;
3. Meningkatnya produksi hasil kehutanan, rehabilitasi dan konservasi Lingkungan;
4. Berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah berkembangnya kehidupan koperasi sebagai penyangga ketahanan UMKM;
5. Berkembangnya usaha industri dan kawasan industri;
6. Berkembangnya usaha perdagangan dan meningkatnya sarana dan prasarana (infrastruktur) perekonomian rakyat;
7. Meningkatnya ketahanan pangan daerah berbasis keragaman produksi.

Sasaran MISI 2 :

1. Meningkatnya kecerdasan masyarakat;
2. Meningkatnya minat baca masyarakat;
3. Meningkatkan derajad kesehatan masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga serta berbasis gotong-royong dan relegius
5. Meningkatnya pelayanan keluarga berencana;
6. Meningkatnya keberdayaan dan lembaga pemberdayaan masyarakat pedesaan;
7. Meningkatnya kesempatan kerja dan kualitas tenaga kerja;
8. Meningkatnya Transmigran Swakarsa;
9. Meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman;
10. Berkembangnya masyarakat berbasis pranata sosial;
11. Meningkatnya perkembangan dan pelestarian budaya;
12. Meningkatnya kelembagaan kepemudaan dan prestasiolah raga;
13. Meningkatnya kehidupan demokrasi dan partisipasi masyarakat serta wawasan kebangsaaan dan politik daerah serta meningkatnya ketertiban, keamanan dan ketentraman.

Sasaran MISI 3 :

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan pemukiman yang mendukung iklim investasi;
2. Meningkatnya potensi kepariwisataan;
3. Terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup;
4. Meningkatnya pengelolaan energy dan sumberdaya mineral;
5. Meningkatnya iklim pengembangan dunia usaha;
6. Meningkatnya iklim pengembangan dunia usaha meningkatnya system transportasi
7. Meningkatnya Kualitas pengelolaan pertanahan ;
8. Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW.

Sasaran MISI4 :

1. Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan yang professional, efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel;
3. Tersedianya data statistik daerah yang akurat dan tepat waktu;
4. Meningkatnya fungsi pelayanan kependudukan;

5. Meningkatnya fungsi pelayanan komunikasi dan informasi;
6. Meningkatnya pengelolaan kearsipan.

A.5. INDIKATOR KINERJA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018, maka pada tahun 2018 sebagai upaya untuk menyempurnakan indikator kinerja utama daerah maka ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Indikator Kerja Utama Daerah. Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel Indikator Kinerja Utama Kabupaten Madiun dan Target 2018

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018
1	2	3	4
1	NTP	%	110,47
2	Persentase Penambahan UMKM	%	10,5
3	Persentase Koperasi aktif	%	86
4	Kontribusi sektor perdagangan thd PRDB	%	15,75
5	SkorPolaPanganHarapan	%	92,4
6	Angkakelulusan		
	SD/MI	%	100
	SMP/MTS	%	100
7	AngkaMelanjutkandari SD/MI ke SMP/MTS	%	95,45
8	AngkaMelanjutkandari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA	%	77,79

9	Angka kematian ibu (per 100.000 KH)	per 100.000 KH	102
10	Angka kematian bayi (per 1000 KH)	per 1000 KH	8
11	Angka kematian balita (per 1000 kh)	per 1000 KH	1,07
12	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	70,46
13	Prosentase gizi buruk	%	0,42
14	Indeks Pembangunan Manusia	%	71,26
15	Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa	%	15
16	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,1
17	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Unit	0
18	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	%	0
19	Persentase Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Tertangani	%	100
20	Indeks Pembangunan Gender	IPG	91,55
21	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,305
22	Jumlah Kelompok Seni	Buah	214
23	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Buah	206
24	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	50,3
25	Persentase Jembatan Kondisi Baik	%	94,8
26	Persentase Jalan Lingkungan Pemukiman Dalam Kondisi Baik	%	49,73
27	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	0,04
28	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH	74,05
29	Rasio Ruang Terbuka Hijau	HPL/ HPG	9,14
30	Jumlah Investor (PMDN/PMA)	Orang	420
31	Jumlah Nilai Investasi (PMDN/ PMA)	Rp	79.244.206.600
32	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda	%	100

33	Angka Kriminalitas	kasus	235
34	Penilaian Predikat Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	-	B
35	Peringkat Nasional Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	-	24
36	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	-	82

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan. Perjanjian Kinerja sangat penting untuk dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan Karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan program atau kegiatan instansi akan lebih baik, dalam mencapai visi dan misi Bupati.

Penyusunan Penetapan Kinerja Kabupaten Madiun tahun 2018 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2013-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018, dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Madiun telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2018 sebagaimana terlampir di Lampiran I.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber dayaanggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sebagai bagian dari komitmen Pemda Kabupaten Madiun untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, maka dilakukanlan 2 (dua) aksi, yaitu disusunnya Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015, tentang Pedoman penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta dikembangkannya web-monev yang merupakan bagian kunci untuk mendorong pelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

Adapun web monev tersebut dapat diakses ada portal www.madiunkab.go.id, dengan lokus SIMBANGDA, terutama pada halaman SAKIP. Pada laman SAKIP tersebut dapat dilihat seluruh data penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.

Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam mengukur skala capaian kinerja instansi pemerintah, berikut ini adalah Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	100% ≤	Tercapai Target	
2	≤ 100%	Tidak Tercapai Target	

3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.2 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun untuk tahun 2018. Pencapaian Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Madiun tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel : 3.1.1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Tahun 2018		
		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian Kinerja %
	Meningkatnya Kesejahteraan petani			
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	110,47	106.53	96,43

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Tahun 2018		
		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian Kinerja %
	Berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah dan berkembangnya kehidupan koperasi sebagai penyangga ketahanan UMKM			
2	Persentase penambahan UMKM (%)	10,5	11	104,7
3	Persentase Koperasi aktif (Unit)	86	116	134,8
	Meningkatnya Kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi			
4	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB %	15,75	16,52	104.8
	Meningkatnya ketersediaan pangan			
5	Skor pola pangan harapan (%)	92,4	90,7	98,1
	Meningkatnya ketersediaan pangan			
6	Persentase Angka Kelulusan			
	- SD/MI (%)	100	100	100
	- SMP/MTs (%)	100	100	100
7	Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTS	95,45	97,30	101,93
8	Angka melanjutkan dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA	77,79	86,02	110,58
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat			
9	Angka kematian ibu (per 1000 KH)	102,00	157,60	64,72
10	Angka kematian bayi (per 1000 KH)	8,00	6,64	120,48
11	Angka kematian anak balita (per 1000 kh)	1,07	0,68	157,35
12	Angka Usia Harapan Hidup	70,46	70,36	99.8
13	Prosentase gizi buruk (%)	0,42	0,19	221,05
	Meningkatnya kualitas kesejahteraan masyarakat			
14	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,26	70,27	98,61
	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat			

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Tahun 2018		
		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian Kinerja %
15	Presentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa	15	15,04	100,27
	Meningkatnya kesempatan kerja			
16	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,10	3,19	128,53
	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman			
17	Jumlah rumah tidak layak huni (unit)	0	0	100
18	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	0	0,1	99,9
	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak			
19	Presentase Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani	100	100	100
20	Indeks Pembangunan gender	91,55	91,57	100
	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk			
21	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,305	0,28	108,93
	Meningkatnya perkembangan dan pelestarian budaya			
22	Jumlah Kelompok Seni	214	479	223,83
23	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	206	207	100,49
	Meningkatnya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang			
24	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik.	50,30	64,91	129.04
25	Persentase jembatan kondisi baik (%)	94,83	93,97	99,09
26	Persentase Jalan Lingkungan Pemukiman Dalam Kondisi Baik	49,73	50	100,5
	Meningkatnya potensi kepariwisataan			
27	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	0,04	0,04	100
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup			
28	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,05	75	98,7

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Tahun 2018		
		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Capaian Kinerja %
29	Rasio Ruang Terbuka Hijau	9,14	33,58	369
	Meningkatnya iklim pengembangan dunia usaha / Investas			
30	Jumlah Investor (PMDN/PMA)	420	428	107
31	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA) (Rp)	79.244.206.600	416,858,337,000	526.04
	Meningkatnya ketertiban dan keamanan masyarakat			
32	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda	100	85,71	85,71
33	Angka Kriminalitas	235	231	101
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif,efisien, transparan dan akuntabel			
34	Penilaian Predikat laporan Kinerja Pemerintah Daerah	B	BB	100
35	Peringkat Nasional Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	24	41	58.54
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan pemerintahan			
36	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (IKM)	82	77.76	94

3.1.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Per Sasaran:

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis. Beberapa sasaran strategis yang terkait digabungkan menjadi satu dalam analisis ini.

Sasaran 1 :
Meningkatnya Kesejahteraan Petani

Sasaran meningkatnya kesejahteraan petani merupakan sasaran yang menggambarkan upaya pemerintah Kabupaten Madiun untuk meningkatkan kesjahteraan petani secara obyektif, tidak hanya meningkatkan produktifitas di sektor pertanian saja. Capaian kinerja Sasaran Meningkatnya kesejahteraan petani adalah 96,43%, dengan interpretasi mencapai target 96,43%. Capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petani diukur dengan Indikator Nilai Tukar Petani (NTP). Adapun capaian kinerja indikator sasaran adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.2.1:
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petani Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2018 terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	106.25	110,47	106.53	96,43	110,47	**96,43**
	Rata-rata capaian kinerja				**96,43**		**96,43**

Sumber data:Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2018

Faktor Pendukung Keberhasilan:

Dalam mencapai target kinerja maka berbagai program dan kegiatan dilaksanakan antara lain:

a. Penyediaan sarana produksi benih unggul bersertifikat dan pupuk subsidi sesuai kebutuhan petani.
b. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan secara terpadu.
c. Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana infrastruktur pertanian

Permasalahan:

- Berkurangnya areal luas lahan sawah sebesar 19,4 ha. Pengurangan terjadi di Kecamatan Jiwan, Pilangkenceng. Pengurangan areal lahan sawah terjadi dikarenakan alih fungsi menjadi lahan tegal ataupun pemukiman. Berkurangnya areal sawah akan berpengaruh terhadap hasil produksi padi.
- Pengetahuan dan ketrampilan petani dalam penerapan teknologi budidaya tanaman palawija masih kurang, antara lain dalam penggunaan benih unggul, pengolahan tanah dan penggunaan pupuk berimbang sesuai petunjuk teknis
- Jumlah sarana prasarana yang mengalami kerusakan masih banyak dan tergantung bantuan pemerintah

Strategi Pemecahan Masalah :

a. Intensifikasi Pertanian
b. Meningkatkan penyuluhan dan petak percontohan budidaya palawija dengan menerapkan paket teknologi sesuai spesifik lokasi.
c. Pilihan teknologi:
   - Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT)
   - System of Rice Intensification (SRI)
   - System of Rice Intensification (SRI)

Sasaran	***Indikator***	***Program***	***Jumlah Anggaran Tahun 2019***
Meningkatya Kuantitas dan Kualitas Produksi Pertanian	Nilai Tukar Petani (NTP)	- Pengembangan perkebunan - Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Pertanian - Program Pengembangan Peternakan - Program Tanaman Hortikultura - Program Pengembangan Tanaman Pangan - Program Pengembangan Perikanan	Rp. 350,000,000,- Rp. 420,000,000,- Rp. 700,000,000,- Rp. 900,000,000,- Rp. 6,849,648,000,- RP. 894,795,000.-

Sasaran 2:

Berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah dan berkembangnya kehidupan koperasi sebagai penyangga ketahanan UMKM

Sasaran Berkembangnya usaha mikro berkembangnya kehidupan koperasi sebagai penyangga ketahanan UM merupakan sasaran yang menggambarkan perkembangan UM di Kabupaten Madiun sebagai salah satu roda penggerak perekonomian, dimana dalam pengembangannya ditunjang dengan tumbuh suburnya koperasi sebagai simbol ekonomi yang bersifat kegotong royongan. Sasaran tersebut merupakan penjabaran dari misi 1 RPJMD dengan tujuan Terwujudnya pertanian maju berbasis petani berdaulat sehingga dapat menggerakkan perdagangan, industri dan jasa serta berkembangnya UMKM.

Capaian rata-rata indikator sasaran Berkembangnya usaha mikro dan berkembangnya kehidupan koperasi sebagai penyangga ketahanan UM pada tahun 2018 sebesar 104,9%, dengan interpretasi melampaui target 100%. Capaian sasaran tersebut dicapai dengan 2 indikator yaitu sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel : 3.1.2.2 :
Capaian Kinerja Sasaran Berkembangnya Usaha Mikro Berkembangnya Kehidupan Koperasi Sebagai Penyangga Ketahanan UM Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2018 terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Prosentase penambahan UMKM (%)	2,8	2,53	2,8	110,67%	3,03	92,41
2	Koperasi aktif (%)	85,31	86	85,32	99.2	86	99,2
	Rata-rata capaian kinerja				**104,9**		

Sumber data :Disperdagkop UM

1. Pemberdayaan UM merupakan salah satu upaya dalam menanggulangi kemiskinan. UM terbukti memiliki daya tahan yang relatif kuat dalam menghadadi krisis ekonomi. Peran penting UM itu sendiri dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu jumlah unit usaha yang terbentuk, penyerapan tenaga kerja, perannya dalam peningkatan produk domestik bruto dan sumbangannya terhadap ekspor nasional.

Pertumbuhan UM Kabupaten Madiun terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun pada tahun 2015 jumlah UM adalah 44.971 unit dan pada tahun 2016 jumlah UM menjadi 45.255 unit. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah 45.512. Pada tahun 2017 kabupaten/kota hanya berwenang menangani ***usaha mikro***. Sedangkan usaha kecil menengah menjadi wewenang propinsi. Upaya yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Madiun dalam meningkatkan jumlah UM menjadi unggul diantaranya melalui program Pembinaan Lingkungan Sosial dengan anggaran Rp. 472,095,000,. Dimana program tersebut mencakup kegiatan pelatihan-pelatihan bagi UM serta Promosi Produk Koperasi dan Usaha Mikro.

Permasalahan:

- Keterbatasan SDM (Managerial serta IT)
- Keterbatasan akses ke sumberdaya produktif.
- Rendahnya kemampuan UM dalam mengembangkan produknya
- Masih banyak UM yang belum memiliki ijin usaha

Strategi Pemecahan Masalah:

- Mendorong upaya penumbuhan UM baru, dengan memperhatikan usaha yang bersifat menguntungkan, dengan diikuti manajemen promosi yang baik.
- Pemberian bantuan tidak hanya berupa modal tetapi juga bantuan pelatihan dan alat produksi.
- Memberikan sosialisasi pentingnya ijin usaha

Rencana Tindak Tahun 2019:

Sasaran	***Indikator***	***Program***	***Jumlah Anggaran Tahun 2019***
Berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah dan berkembangnya kehidupan koperasi sebagai penyangga ketahanan UMKM	Persentase penambahan UM (%)	- Program pembinaan lingkungan sosial - Program Pengembangan Usaha Mikro	Rp.7,057,821,398,- Rp. 157,721,580,-

1. Koperasi aktif (%)

Persentase koperasi aktif dihitung dari jumlah koperasi aktif dibandingkan jumlah seluruh koperasi x 100%. Dimana koperasi aktif berjumlah 674 unit dan keseluruhan koperasi berjumlah 790 unit. Sehingga realisasi Persentase koperasi aktif pada tahun 2017 adalah sebesar 85,31%. Sedangkan target tahun 2017 adalah 85,22%, Pada tahun 2018 mencapai 85,32% dengan target koperasi aktif sebesar 86% sehingga capaian kinerjanya 99,2%, dengan interpretasi memenuhi target 99,2%.

Berikut ini adalah tabel perkembangan realisasi indikator kinerja koperasi aktif tahun 2016 s/d 2018:

Tabel Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja Koperasi Aktif Tahun 2016 S/D 2018:

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi2017	Target 2018	Realisasi 2018	Realisasi (%)	Target RPJMD 2018	Capaian 2018 (%)
1	Persentase Koperasi Aktif (%)	84,5	85,22	85,22	85,31	86	85,32	99,2	86	99,2

Adapun perkembangan pertumbuhan koperasi di Kabupaten Madiun sejak tahun 2013 s/d 2018 tabel di bawah ini :

Tabel Perkembangan Jumlah Koperasi di Kabupaten Madiun Tahun 2013 S/D 2018:

	2013	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*
Jumlah koperasi	690	707	728	785	790	790

Sumber data: Diskoperindagpar Tahun 2017

Untuk mencapai kinerja pada indikator sasaran Persentase koperasi aktif tersebut Pemerintah Kabupaten Madiun melaksanakan program nasional yaitu Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dengan anggaran adalah sebesar Rp. 906,649,500,-

Permasalahan :

- Sumber daya manusia (SDM) yang kurang memahami masalah pembukuan sehingga sulit melakukan pertanggungjawaban kepada anggota.
- Kurang berkembangnya koperasi karena terbatasnya permodalan.
- Tingkat partisipasi anggota koperasi masih rendah

Strategi Pemecahan Masalah :

- Manajemen koperasi harus diarahkan pada orientasi strategik dan gerakan koperasi harus mampu memobilisasikan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang usaha.

- Melakukan pengawasan terhadap lembaga koperasi melalui pembentukan badan pengawas koperasi yang ditujukan bagi pengawasan terhadap lembaga tersebut, agar koperasi berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Rencana Tindak Tahun 2019:

Sasaran	Indikator	Program	Jumlah Anggaran 2019
Berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah dan berkembangnya kehidupan koperasi sebagai penyangga ketahanan UMKM	Persentase Koperasi Aktif	- Program Pengembangan Koperasi	Rp. 596,875,850,-

Sasaran 3 :

Meningkatnya Kontribsi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi

Pembangunan perdagangan merupakan salah satu kegiatan dibidang ekonomi yang mempunyai peran strategis dalam rangka pembangunan yang berwawasan nusantara. Sektor perdagangan berperan dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar. Pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, dan memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Kegiatan sektor perdagangan saling berkait dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya, seperti sektor produksi, yaitu pertanian, industri, dan pertambangan; sektor keuangan; sektor perhubungan dan telekomunikasi. Sasaran Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi merupakan sasaran yang menggambarkan upaya Kabupaten Madiun dalam meningkatkan sektor perdagangan.

Tabel : 3.1.2.3:
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribsi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2018 terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	15,63%	15,75	16,52%	104,8%	15,75%	104,8%
	Rata-rata capaian kinerja				**104,8%**		**104,8**

Sumber : DisdagkopUM 2019

Capaian sasaran Berkembangnya Usaha Perdagangan diukur dengan indikator kinerja Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB 2018 adalah sebesar 16,52% dengan target 15,75%dengan demikian telah mencapai target dan interpretasi melebihi target 100%.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor unggulan setelah sektor pertanian, mengingat letak geografis di wilayah Kabupaten Madiun merupakan jalur selatan yang banyak dilalui kendaraan lintas propinsi, memberikan peluang pada sektor perdagangan, hotel dan restoran untuk berkembang. Selain itu pascaboyongan Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Madiun (27/8/2014) dari Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun ke Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun secara kasar pergerakan perdagangan diwilayah sekitar mengalami peningkatan meskipun belum signifikan, karena belum semua OPD yang belum melaksanakan pindah kantor ke Kecamatan Mejayan. Akan tetapi perekonomian di sekitar pusat pemerintahan mulai mengalami peningkatan.

Permasalahan :

1. Kesulitan dalam pengaturan PKL;
2. Banyaknya pedagang kecil yang tidak memiliki ijin usaha sehingga sulit melakukan pendataan dan pembinaan;
3. Makin maraknya toko modern perlu adanya pembinaan;

Strategi Pemecahan Masalah :

1. Memfasilitasi dan memberikan pembinaan pada PKL
2. Penertiban pedagang pasar yang tidak resmi
3. Pembinaan pada toko modern
4. Memaksimalkan fungsi dari paguyuban pedagang sebagai forum diskusi antar pedagang
5. Pengembangan wilayah di Kabupaten Madiun sesuai dengan SSWP.

Rencana Tindak Tahun 2019 :

Sasaran	***Indikator***	***Program***	***Jumlah Anggaran 2019***
Meningkatnya Kontribsi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi	- Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	- Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam negeri - Program pembangunan dan rehabilitasi pasar	Rp. 4,700,421,560,- Rp. 1.804.771.190,-

Sasaran 4:

Meningkatnya ketahanan pangan daerah berbasis keragaman produksi

Sasaran meningkatnya ketahanan pangan daerah berbasis keragaman produksi merupakan sasaran yang menggambarkan upaya pemerintah Kabupaten Madiun dalam mewujudkan kemandirian pangan. Capaian kinerjanya diukur dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan

Tabel : 3.1.2.4 :
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya ketahanan pangan daerah berbasis keragaman produksi Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2018 terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Skor pola pangan harapan (%)	90,7	92,4	90,7	98,1	92,4	98,1
	Rata-rata capaian kinerja				**98,1**		**98,1**

Sumber Data: Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Madiun

1) Skor Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan adalah "komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsidapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya".Semakin tinggi skor mutu pangan, menunjukkan situasi pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutugizinya. Capaian kinerja Indikator Skor Pola Pangan Harapan pada tahun 2017 adalah 98,9% dengan interpretasi belum memenuhi target 100%. Capaian kinerja tersebut diukur dengan realisasi indikator kinerja skor pola pangan harapan tahun 2017 sebesar 90,7% dibandingkan dengan target 2017 sebesar 91,7%.

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dari segi kuantitas dan kualitas keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari 3 sumber yaitu : 1) produksi dalam negeri; 2) pemasokan pangan; 3) pengelolaan cadangan pangan. Ketersediaan pangan dapat

diamati pada berbagai tingkatan mencakup rumah tangga, regional (kab/kota, provinsi) dan nasional. Namun demikian, penyediaan yang sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk baik jumlah maupun mutunya merupakan masalah terbesar sepanjang sejarah kehidupan.Situasi ketersediaan pangan wilayah antara lain tercermin dari jumlah ketersediaan pangan, yang digambarkan dari ketersediaan pangan maupun mutu keanekaragaman ketersediaan pangan yang digambarkanoleh skor Pola Pangan Harapan (PPH). Pencapaian skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Madiun tahun 2018 sebesar 90,7%, apabila dibandingkan dengan Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Madiun tahun 2017 sebesar 90,7%, cenderung stagnan dan tidak mengalami perubahan.

Keragaman pangan masyarakat dengan indikator skor Pola Pangan Harapan (PPH), menunjukkan bahwa skor mutu konsumsi penduduk masih fluktuatif. Meskipun ada peningkatan skor PPH namun pola konsumsi masih didominasi kelompok pangan padi-padian. Skor PPH Kabupaten Madiun dari tahun 2013 sampai dengan 2017 Berdasarkan Kelompok Bahan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018

No.	Kelompok Bahan Pangan	Skor PPH					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Padi-padian	23.5	25.0	25.0	17.5	25.0	25.0
2.	Umbi-umbian	2.3	2.2	2.3	1.8	2.5	2.2
3.	Pangan Hewani	18.9	18.8	21.2	24	1938	20
4.	Minyak dan Lemak	4.7	5.0	4.7	5	4.6	4
5.	Buah/biji berminyak	0.6	0.7	0.7	1	0.8	2
6.	Kacang-kacangan	10.0	10.0	10.0	10	10.0	10
7.	Gula	1.6	1.6	2.1	1.3	2.4	1.5
8.	Sayuran dan buah	25.8	25.9	24.4	30	25.7	29.8
9.	Lain-lain	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**87.4**	**89.2**	**90.4**	**90.7**	**90.7**	**90.7**

Sumber Data : Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Madiun Tahun 2013–2018

**) Angka Kecukupan Energi (AKE) : 2000 Kkal/Kap/Hari*

Permasalahan :

- Masih banyak masyarkat yang belum memahami konsumsi pangan B2SA.
- Banyaknya pangan olahan yang masih menggunakan bahan tambahan makanan (pewarna,pemanis, pengawet, dll) yang belum sesuai dengan anjuran pemakaiannya.

Strategi Pemecahan Masalah :

- Kerja sama dalam transfer inovasi teknologi dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi.
- Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP).
- Pengembangan pola konsumsi yang beragam, bergizi, berimbang dan aman (B2SA).
- Pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan.

Rencana Tindak Tahun 2019 :

Sasaran	***Indikator***	***Program***	***Jumlah Anggaran 2019***
Meningkatnya ketahanan pangan daerah berbasis keragaman produksi	Skor pola pangan harapan (%)	- Program peningkatan ketahanan pangan	Rp. 598,780,480,-

Sasaran 5:
Meningkatnya kualitas pendidikan

Sasaran Peningkatan kualitas pendidikan merupakan sasaran yang menggambarkan penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun non formal guna menghasilkan generasi bangsa yang tangguh, berkualitas dan berprestasi. Sehingga diperlukan adanya peningkatan pelayanan pendidikan baik akses maupun mutu yang meliputi peningkatan kualitas kurikulum pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta mendorong dan memfasilitasi peserta didik untuk lebih berprestasi.

Tabel : 3.1.2.5 :
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2018 terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Presentase Angka Kelulusan						
	- SD/MI (%)	100	100	100	100	100	100
	- SMP/MTs (%)	95,67	100	100	100	100	100
2	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTS	96,77	95,45	97,30	101,94	95,45	101,94
3	Angka Melanjutkan dari SMP/MTS ke SMA/ SMK/MA	90,99	77,79	86,02	110,58	77,79	110,58
	Rata-rata capaian kinerja				**103,13**		**103,13**

Sumber data : Dinas Pendidikan Tahun 2018

Capaian rata-rata indikator sasaran Peningkatan kualitas pendidikan sebesar 103,13 %, dengan interpretasi melampaui target 100%.

Sasaran tersebut diukur dengan 3 indikator yaitu:

1. Angka Kelulusan

   Angka kelulusan menjadi salah satu indikator atau tolak ukur tingkat keberhasilan sekolah dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Angka kelulusan tinggi bisa pula dianggap sebuah prestasi sehingga kebanggaan bagi sekolah yang bersangkutan. Angka kelulusan adalah perbandingan antara jumlah lulusan tahun sekarang dibandingkan dengan jumlah siswa kelas tertinggi. Pada tahun 2018 angka kelulusan jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs di Kabupaten Madiun pada tahun 2018 tercapai 100%.

   Faktor Pendukung Keberhasilan :

   - Memberikan bimbingan intensif kepada siswa kelas VI jenjang SD/MI dan kelas IX jenjang SMP/MTs
   - Penyelenggaraan try out yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten maupun bekerjasama dengan pihak lain seperti Lembaga Bimbingan Belajar dan lembaga lain yang mengadakan try out.
   - Simulasi UNBK untuk jenjang SMP/MTs

2. Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTS

   Capaian Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTS pada tahun 2018 dengan realisasi sebesar 97,30% dengan interpretasi melampaui target 95,45%. Dengan capaian kinerja sebesar 101,94 %.

   Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs adalah perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs dengan jumlah lulusan SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya. Pada tahun 2018 Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs sebesar 97.30 atau mengalami kenaikan sebesar 0,53% jika dibandingkan dengan tahun 2017. Peningkatan angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs menunjukkan bahwa jumlah siswa lulusan SD/MI dari Kabupaten Madiun semakin banyak yang melanjutkan ke SMP/MTs di Kabupaten Madiun.

   Faktor Pendukung Keberhasilan:

   - Memberikan akses seluas-luasnya kepada lulusan SD/MI untuk masuk ke jenjang SMP/MTs.
   - Kunjungan siswa SMP/MTs ke SD/MI alumninya untuk mengenalkan sekolah lanjutan bagi adik-adik kelasnya.
   - Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang SMP/MTS.

3. Angka melanjutkan dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA.

Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA adalah perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA dengan jumlah lulusan SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya. Pada tahun 2018 Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kabupaten Madiun sebesar 86.02%, atau mengalami penurunan sebesar 4,97% dari realisasi tahun 2017. Penurunan angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA menunjukkan bahwa jumlah siswa lulusan SMP/MTs dari Kabupaten Madiun persentasenya semakin banyak yang melanjutkan ke SMA/SMK/MA di luar Kabupaten Madiun, melanjutkan ke pendidikan informal, atau lebih memilih untuk langsung bekerja.

Upaya untuk meningkatkan Angka melanjutkan dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA adalah:

a. Memberikan Informasi dan motivasi kepada siswa SMP/MTs tentang sekolah lanjutan yang dapat diakses setelah lulus.
b. Meningkatkan koordinasi dengan sekolah menengah.

Rencana Tindak Tahun 2019 :

Sasaran	***Indikator***	***Program***	***Jumlah Anggaran 2019***
Meningkatnya kualitas pendidikan	- Persentase Angka Kelulusan - Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTS - Angka melanjutkan dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA	- Program Pendidikan SD - Program Pendidikan SMP - Program Pendidikan Non Formal. - Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 59.602.699.030,- Rp. 40.837.635.750,- Rp. 444.368.000,- Rp. 1.177.324.000,-

Sasaran 6:
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Pembangunan kesehatan nasional diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan.

Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat merupakan gambaran upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Madiun dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Madiun secara mandiri dan berkeadilan. Rata-rata Capaian kinerja sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat tahun 2018 adalah 132,68 % dengan interpretasi mencapai target 100%. Capaian tersebut diukur dengan 5 indikator sebagimana tabel di bawah ini :

Tabel : 3.1.2.6 :
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2018 terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Angka kematian ibu (per 1000 KH)	157,60	102,00	157,60	64,72	102,00	64,72
2	Angka kematian bayi (per 1000 KH)	6,64	8,00	6,64	116,98	8,00	116,98
3	Angka kematian balita (per 1000 kh)	0,68	1,07	0,68	157,35	1,07	157,35
4	Angka Usia Harapan Hidup	70,36	70,46	70,36	99.8	70,46	99.8
5	Persentase balita gizi buruk (%)	0,19	0,42	0,19	221,05	0,42	221,05
	Rata-rata capaian kinerja				**132,68**		**132,68**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Tahun 2018

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah banyak dilakukan oleh pemerintah selama ini, diantaranya dengan menyediakan sarana dan prasarana pelayanan

kesehatan seperti puskesmas, balai pengobatan dan tenaga medis. Prasarana kesehatan seperti puskesmas, puskesmas pembantu, polindes dan ponkesdes tersebar hampir merata di setiap kecamatan di Kabupaten Madiun. Namun bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2017 sebanyak 679.888 jiwa, maka sarana yang tersedia dirasakan masih terbatas.

Puskesmas merupakan salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan dan kualitas pelayanan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan kesehatan masyarakat serta mensukseskan program jaminan nasional.

Ketersediaan puskesmas di wilayah Kabupaten Madiun adalah sebanyak 26 Puskesmas yang terdiri dari 11 puskesmas rawat inap dan 15 puskesmas rawat jalan dengan rasio 1 (satu) puskesmas melayani 25.000 penduduk. Pada Tahun 2017 jumlah dokter di Kabupaten Madiun sebanyak 56 orang dengan rincian 33 orang dokter umum dan 23 orang dokter gigi.

1. Angka kematian ibu Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat karena AKI menunjukkan kemampuan dan kualitas pelayanan kesehatan. Tingginya AKI dan lambatnya penurunan angka ini menunjukkan bahwa pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) sangat mendesak untuk ditingkatkan baik dari segi jangkauan maupun kualitas AKI. Capaian AKI pada Tahun 2017 adalah 157,60 per 100.000 Lahir Hidup dimana capaian tersebut melebihi target yang ditetapkan sebesar 102 per 100.000 Lahir Hidup, sehingga capaian kinerjanya sebesar 64,72%.

Permasalahan:

a. Faktor 4 Terlalu, dimana masih adanya ibu hamil resiko tinggi baik yang berusia >35 tahun maupun yang belum termasuk usia produktif. Kondisi tersebut yang menyebabkan terjadinya komplikasi selama masa kehamilan, persalinan dan nifas;
b. Faktor 3 Terlambat, dimana ibu hamil terlambat untuk mengetahui bahaya selama masa kehamilan yang seharusnya dikonsultasikan dengan dokter spesialis kandungan (SPOG) agar segera memperoleh penanganan guna meminimalisir terjadinya komplikasi;
c. Kesadaran masyarakat dan ibu hamil yang masih kurang dalam hal perencanaan kehamilan serta menjalani asuhan yang teratur dan berkualitas,
d. Masih banyaknya ibu hamil yang kurang memperhatikan kebutuhan nutrisi selama masa kehamilan, dimana makanan yang dikonsumsi harus memenuhi gizi seimbang tidak hanya bagi ibu hamil tapi juga janin yang dikandungnya.

Strategi Pemecahan Masalah

a. Optimalisasi pelayanan Antenatal Care (ANC) secara terpadu termasuk skrinning pre-eklampsia pada ibu hamil dengan usia kehamilan 16-24 minggu sebagai upaya deteksi dini komplikasi kehamilan;

b. Peningkatan kompetensi petugas dalam penanganan kegawatdaruratan maternal, peningkatan keterampilan kelas ibu bagi bidan puskesmas dan bidan desa serta peningkatan kompetensi tenaga kesehatan pada puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) dan Non PONED dengan narasumber Dokter Spesialis Kandungan (SPOG) dan Dokter Spesialis Anak (SPA);

c. Konseling gizi bagi ibu hamil yang bertujuan memberikan informasi tentang asupan gizi yang diperlukan oleh ibu hamil dan janin untuk menghindari terjadinya komplikasi kehamilan termasuk pre eklampsia dan eklampsia;

Pelayanan kelas ibu hamil yang melibatkan keluarga terutama suami, dimana dukungan suami sangat diperlukan pada masa kehamilan, persalinan dan nifas. Keluarga dan suami juga berperan dalam pengambilan keputusan persalinan apakah akan melahirkan normal atau caesar.

Rencana Tindak Lanjut Tahun 2018 :

Sasaran	Indikator	Program dan Kegiatan	Jumlah Anggaran 2018
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	- Angka kematian ibu (per 100.000 LH) - Angka kematian bayi (per 1000 KH) - Angka kematian balita (per 1000 kh) - Angka Usia Harapan Hidup - Persentase balita gizi buruk (%)	- Program Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Program Program Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Pelayanan Kesehatan - Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Kesehatan	Rp 3,769,046,947,- Rp 8,123,755,760,- Rp 20,350,980,190,- Rp 999,586,150 ,-

2. Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. AKB Tahun 2017 adalah sebesar 6,64 per 1000 Lahir Hidup dengan target sebesar 8,00 per 1000 Lahir Hidup, sehingga capaian kinerjanya sebesar 116,98% dengan interpretasi mencapai target. Capaian tersebut menurun jika dibandingkan Tahun 2016 sebesar 8,72 per 1000 Lahir Hidup dan Tahun 2015 sebesar 10,26 per 1000 Lahir Hidup.

Tabel
Capaian Angka Kematian Bayi Kabupaten Madiun

2013	2014	2015	2016	2017
110,83	82,40	41,88	108,97	157,60

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Tahun 2018

Permasalahan :

a. Penyebab kematian bayi terbanyak adalah BBLR, dimana berat lahir bayi mencerminkan hasil perkembangan dalam kandungan dan kecukupan nutrisi bayi saat dilahirkan. Bayi dikatakan memiliki berat lahir rendah atau BBLR apabila memiliki berat badan kurang dari 2500gr (2,5 kg). Berat lahir bayi ditentukan oleh beberapa faktor yang pada umumnya berkaitan dengan kesehatan ibu dan kesehatan saat kehamilan antara lain status gizi ibu sebelum hamil dan berat badan ibu selama kehamilan;
b. Asfiksia pada bayi baru lahir disebabkan oleh riwayat kesehatan ibu saat akan melahirkan dimana tekanan darah ibu meningkat serta keadaan jantung bayi melemah;
c. Tingkat pendidikan ibu sangat berpengaruh terhadap kesadaran untuk melakukan pemeriksaan rutin selama kehamilan sebagai upaya deteksi dini adanya komplikasi;
d. Kompetensi tenaga kesehatan masih kurang dalam pertolongan persalinan dan penanganan awal BBLR.

Strategi pemecahan masalah:

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan adalah:

a. Pelayanan Antenatal Care (ANC) terpadu meliputi pendampingan ibu hamil resiko tinggi dan konseling gizi tentang kebutuhan nutrisi yang adekuat untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi yang dikandungnya serta persiapan fisik ibu dalam menghadapi proses persalinan;

b. Optimalisasi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) bagi keluarga dan ibu hamil tentang perencanaan dan perawatan kehamilan yang aman, pemilihan penolong persalinan dan sistem rujukan persalinan;

c. Peningkatan kompetensi penanganan kegawat daruratan neonatal bagi bidan puskesmas dan bidan desa dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan dibidang penanganan kegawatdaruratan neonatal.

3. Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian anak balita khususnya umur 1-5 tahun per 1.000 kelahiran hidup. Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka Kematian Balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk. Capaian AKABA Tahun 2017 adalah 0,68 per 1000 Lahir Hidup dengan target sebesar 1,07 per 1000 Lahir Hidup, sehingga kinerjanya mencapai 136,87% dengan interpretasi mencapai target 100%.

Permasalahan:

a. Kematian anak akibat radang paru berkaitan dengan kondisi ekonomi yang memengaruhi tingkat gizi dan ketidakmampuan untuk mengakses fasilitas kesehatan. Adanya informasi yang benar tentang penyakit ini pada petugas kesehatan serta pemenuhan gizi yang cukup, diharapkan angka kematian akibat penyakit ini dapat ditekan hingga 42 persen;

b. Pemantauan tumbuh kembang kembang balita oleh keluarga dan petugas kesehatan belum dilaksanakan secara optimal.

Strategi Pemecahan Masalah:

Upaya pencegahan yang menjadi program prioritas untuk menurunkan AKABA :

a. Pemantauan kesehatan balita oleh petugas kesehatan yang dilaksanakan di posyandu maupun di puskesmas meliputi penimbangan, pemberian vitamin, imunisasi dan pemeriksaan kesehatan;

b. Peningkatan kompetensi Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) bagi bidan puskesmas, bidan desa dan dokter puskesmas yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan dalam tatalaksana kasus balita sakit;

c. Peningkatan keterampilan stimulasi deteksi dini tumbuh kembang anak balita bagi tenaga bidan puskesmas dan bidan desa yang bertujuan untuk

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga bidan dalam pelayanan tumbuh kembang anak balita.

4. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	69,68	69,76	70,36	70,48	70,36	70,36

Derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi yang secara tak langsung dapat meningkatkan angka harapan hidup. Menurut Statistics Indonesia, angka harapan hidup pada saat lahir *(life expectancy at birth)* ialah prata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.

4. Persentase Balita Gizi Buruk

Keberhasilan dalam implementasi pembangunan kesehatan nasional sangat bertumpu pada bagaimana kita memberikan perhatian pada nutrisi dalam keluarga, terutama pada anak-anak dalam masa tumbuh kembang. Gizi buruk adalah kondisi tubuh terparah yang mengalami kekurangan gizi dalam kurun waktu yang lama (menahun). Hal ini umumnya terjadi pada anak-anak, gizi buruk pada anak seringkali disebabkan oleh kurangnya asupan makanan bergizi seimbang, di samping itu bisa juga disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan terganggunya proses pencernaan makanan ataupun terganggunya penyerapan zat gizi penting yang diperlukan oleh tubuh.

Capaian kinerja indikator Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2017 adalah sebesar 170,46% dengan interpretasi mencapai target 100%. Capaian kinerja tersebut diukur dengan membandingkan target Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2017 sebesar 0,64% dengan realisasi tahun 2017 sebesar 0,19%.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan :

a. Pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) anak usia 6–24 bulan dari keluarga miskin sebanyak 1.200 balita selama 90 hari dalam rangka meningkatkan status gizi balita dan mempertahankan status gizi balita keluarga miskin;

b. Pemberian makanan tambahan bagi anak balita Kurang Energi Protein (KEP) umur 1-5 tahun dengan status gizi buruk berupa nutrisi enteral sebanyak 165 anak balita selama 90 hari;

c. Pemberdayaan keluarga dan penyampaian informasi tentang pengetahuan mengenai pentingnya mengonsumsi makanan dengan kandungan gizi yang baik;

d. Peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak, sosialisasi dan edukasi untuk pemberian air susu ibu (ASI) secara eksklusif selama enam bulan dan dilanjutkan hingga usia dua tahun dengan pemberian makanan pendamping ASI.

Perbandingan capaian AKI, AKB, AKBAL dan Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2013 s/d 2017 di Kabupaten Madiun :

Tabel

Capaian AKI, AKB, AKBAL dan Persentase Balita Gizi Buruk

Tahun 2013 s/d 2017

TAHUN	AKI per 100.000 LH	AKB per 1.000 LH	AKABA per 1.000 LH	GIZI BURUK (%)
2013	110,83	9,77	1,31	0,51
2014	82,40	9,58	1,44	0,31
2015	41,88	10,26	0,94	0,32
2016	108,97	8,72	1,85	0,25
2017	157,60	6,64	0,68	0,19

Sasaran 7 :
Meningkatnya kualitas Kesejahteraan masyarakat

Sasaran Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga serta berbasis gotong royong dan religius menggambarkan bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten madiun dalam mengatasi permasalah kesejahteraan Masyarakat dan peningkatan kualitas penyandang masalah sosial agar lebih mandiri. Sasaran Meningkatnya kualitas kesejahteraan keluarga serta berbasis gotong royong dan religius diukur dengan 1 indikator sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel : 3.1.2.7 :
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Masyarakat 2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2016 terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Indeks Pembangunan Manusia	70,27	71,26	70,27	98,61	71,26	98,61
	Rata-rata capaian kinerja				**98,61**		**98,61**

Sumber data: Dinas Sosial

Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Manusia, pada tahun 2018 capaiannya sebesar 98,61 %, dengan interprestasi belum mencapai target yaitu sebesar 98,61%. Nilai capaian tersebut diperoleh dari realisasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 1.894.143.500,-

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan :

- Dilaksanakanya Pelatihan Kewirausahaan usaha ekonomi produktif dengan sasaran wanita rawan ekonomi sosial.
- Dilaksanakannya Pemberdayaan organisasi sosial dan pembinaan terhadap remaja bermasalah pada sejumlah desa dan kelurahan.

- Pembinaan yang bersifat kontinu dan berkesinambungan terhadap SDM internal pada lingkup dinas sosial dan organisasi masyarakat yang menunjang kinerja penanggulangan masalah sosial.

Rencana Tindak Tahun 2019 :

Sasaran	***Indikator***	***Kegiatan***	***Jumlah Anggaran 2019***
Meningkatnya kualitas Kesejahteraan masyarakat.	- Indeks Pembangunan Manusia	-Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp 55,292,300,-

Sasaran 8 :

Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa dinamika masyarakat pada tingkat desa dapat terwadahi dalam tiga institusi utama, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah desa untuk mengelola, merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan menggali swadaya gotong royong masyarakat desa.

Tabel : 3.1.2.8 :
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas kehidupan Masyarakat 2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2018 terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa	12,60	15,00	15,04	100,27	15,00	100,27
	Rata-rata capaian kinerja				**100,27**		

Sumber data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2018

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa. Capaian kinerjanya pada tahun 2018 adalah 15,04%, yaitu 31 desa/kelurahan dari 206 desa/kelurahan dengan capain kinerja 100,27%. Sedangkan 13 desa/kelurahan berstatus swakarya dan siasnya 162 desa/kelurahan berstatus swasdaya. Untuk mewujudkan indikator di atas maka dilaksanakan dengan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan :

a. Penyusunan dan peningkatan Kapasitas kepala desa/kelurahan atas aplikasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (EPDesKel).

b. Dilaksanakan Lomba Desa dan Kelurahan sebagai sarana penunjang pembinaan penguatan kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat di Desa dan Kelurahan.

Rencana Tindak Tahun 2019 :

Sasaran	***Indikator***	***Program***	***Jumlah Anggaran 2019***
Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat	- Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa	-Program Peningkatan Pembangunan dan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan -Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Rp 1.658.785.920,- Rp 821.624.100,-

Sasaran 9:
Meningkatnya Kesempatan Kerja

Sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja merupakan sasaran yang menggambarkan upaya pemerintah Kabupaten Madiun dalam meningkatkan kesempatan kerja dan kualitas tenaga kerja.

Tabel : 3.1.2.9 :
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesempatan KerjaTahun 2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2018 terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,50	4,10	3,19	128,5	4,10	128,5
	Rata-rata capaian kinerja				**128,5**		

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja Tahun 2018

Analisa mengenai sumber daya manusia tidak pernah terlepas dari faktor ketenaga kerjaan karena merupakan salah satu dimensi yang vital. Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah yang mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Madiun, mengingat struktur ekonomi di Kabupaten Madiun di dominasi oleh sektor pertanian.

Capaian sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Adapun realisasi indikator tersebut pada tahun 2018 adalah sebesar 3,19%, capaian kinerjanya 128,5% yang diinterpretasikan mencapai target 100%. Hal ini lebih tinggi bila dibandingkan target akhir RPJMD 2018 sebesar 4,10%. Untuk mewujudkan kinerja tersebut diimplementasikan melalui program peningkatan kualitas tenaga kerja, program peningkatan kesempatan kerja Rp. 882.880.000, program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan dengan Anggaran sebanyak Rp. 104.990.000,-.

Permasalahan :

- Minimnya lapangan pekerjaan yang ada di wilayah Madiun dan sekitarnya serta karena banyaknya jenis dan jenjang pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan sehingga banyak pencari kerja yang enggan mencoba.

Strategi Pemecahan Masalah:

- Pengembangan informasi dan bursa kerja
- Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam menciptakan, memperluas dan mengembangkan lapangan kerja/kesempatan kerja
- Meningkatnya perlindungan tenaga kerja untuk menciptakan keserasian hubungan kerja
- Meningkatkan daya saing, standar mutu tenaga kerja, kualitas pelatihan tenaga kerja

Rencana Tindak Tahun 2019 :

Sasaran	***Indikator***	***Pogram***	***Jumlah Anggaran 2019***
Meningkatnya kesempatan kerja	Pencari kerja yang ditempatkan	- Program peningkatan kesempatan kerja	Rp. 816,611,345,-
		- Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Rp. 430,951,095,-

Sasaran 10 :
Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman

Otonomi daerah telah mengamanatkan bahwa pembangunaan dan perumahan dan permukiman menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Hunian merupakan kebutuhan dasar manusia dan sebagai hak bagi semua orang untuk menempati hunian yang layak. Dalam kerangka hubungan ekologis antara manusia dan lingkungan pemukimannya terlihat jelas bahwa kualitas sumberdaya manusia di masa yang akan datang sangat dipengaruhi oleh kualitas perumahan dan permukiman di mana masyarakat tinggal menempatinya.

Tabel : 3.1.2.10 :
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas Lingkungan pemukiman
Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2018 terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	0	0	0	100	0	100
2	Persentase Lingkungan kumuh	0,5	0	0,1	80%	0	80%
	Rata-rata capaian kinerja						

Sumber data: Dinas Perkim Kabupaten Madiun

1. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni

   Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani di Kabupaten Madiun pada tahun 2017 sebanyak 692 unit, bila dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2018 sebanyak 0 unit rumah maka capaian Kinerja indikator ini adalah 100%.

Selain itu masih ditunjang dengan pelaksanaan Program Pengembangan Perumahan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun pada tahun 2018 anggaran sebesar Rp. 1.293.487.000 dan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dengan serapan anggaran sebesar Rp. 220.000.000.

2. Persentase Lingkungan kumuh

   Begitu pula pada indikator persentase Lingkungan kumuh, Pemerintah Kabupaten Berkomitmen penuh terhadap penekanan angka persentse Lingkungan kumuh dengan capaian kinerja tahun 2017 sebesar 0,5 dapat ditekan pada tahun 2018 dengan capaian 0,1 meskipun masih belum mencapai target 100%.

Rencana Tindak Tahun 2019 :

Sasaran	***Indikator***	***Kegiatan***	***Jumlah Anggaran 2019***
Meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman	-Jumlah rumah layak huni(unit). -Jumlah rumah tidak layak huni. -Presentase Lingkungan Kumuh.	- Program Pengembangan Perumahan. - Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Rp. 1.293.487.000,- Rp. 220.000.000,-

Sasaran 11 :

Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak

Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan sangat diperlukan karena kualitas kehidupan perempuan dan anak masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Masalah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah masalah yang pelik, bahkan sebagian besar masih ditutupi karena dianggap tabu. Capaian kinerja Sasaran perlindungan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2018 sebesar 100% dengan interpretasi mencapai target 100%, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel : 3.1.2.11 :
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2018 terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Persentase Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Tertangani	100	100	100	100	100	100
2	Indeks Pembangunan Gender	51,25	51,65	51,95	100,58	51,65	100,58
	Rata-rata capaian kinerja				**100**		**100**

Sumber data : Dinas PP &KB, PP dan PA Kabupaten Madiun Tahun 2018

Tahun 2018 realisasi dari indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam Unit Layanan Terpadu sebesar 100,00%. Realisasi ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah pelaporan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditindak lanjuti dengan

Jumlah penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masuk. Pada tahun 2018 ada 17 kasus yang dilaporkan dan semuanya telah ditindak lanjuti,hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8

Jumlah, Jenis Tindak Kekerasan dan Pelayanan Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2018

Jumlah Kasus	Tindak kekerasan						Pelayanan yg diberikan				
	Fisik	Psikis	Seksual	Eksploitasi	Penelantaran	Lainnya	Penanganan pengaduan	Pelayanan kesehatan	Rehabilitasi Sosial	Penegakan dan bantuan hukum	Pemulangan dan Reintegrasi
Perempuan	1	3	1	-	-	-	5	5	5	5	5
Anak		1	13	-	-	3	17	17	17	17	17

Sumber data : Dinas PP &KB, PP dan PA Kabupaten Madiun Tahun 2018

Capaian kinerja indikator Indeks Pembangunan Gender adalah 100,58%. dengan interprestasi mencapai target 100%.

Untuk mewujudkan indikator tersebut maka dilaksanakanlah program penguatan kelembagaan pengausutamaan gender dan anak dengan anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 411,430,000,-

Faktor Pendukung Keberhasilan :

1. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang telah melaksanakan fungsinya dengan baik.
   Pada tahun 2018 ada 20 lembaga P2TP2A yang telah terbentuk dan semuanya telah berfungsi sebagaimana Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 9 tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu :
   a. Sebagai pusat informasi bagi perempuan dan anak
   b. Pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
   c. Pusat pemberdayaan bagi perempuan dana anak
2. Terlembaganya Forum Anak.
3. Kerjasama yang baik lintas sektor untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
4. Terwujudnya kabupaten layak anak tingkat madya.
5. Adanya strategi PPRG yang diterapkan dalam penyusunan anggaran setiap OPD

Permasalahan :

Masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak jika diibaratkan adalah fenomena *gunung es* di permukaan, yaitu banyak kasus kekerasan yang terjadi secara nyata tetapi masih banyak kasus yang belum terungkap yang dikarenakan oleh :

1. Kurang terbukanya masyarakat terhadap kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Kurang dipahaminya peraturan perundangan tentang perlindungan perempuan dan anak.

Strategi Pemecahan Masalah :

Strategi untuk meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat jika menemui, melihat dan mengalami kasus kekerasan agar mempunyai kesadaran untuk melaporkan kasus tersebut sehingga kasus kekerasan tidak terulang dan membuat efek jera pada pelakunya, antara lain :

1. Meningkatkan komitmen OPD melalui pelaksanaan kebijakan yang responsif gender dan anak guna meningkatkan pemenuhan jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak.
2. Fasilitasi kepada masyarakat tentang pemberdayaan, perlindungan dan memberikan pendampingan dan penanganan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.
3. Sosialisasi dan advokasi yang dilakukan secara terus menerus mengenai peraturan perundangan terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak.
4. Memperkuat mekanisme koordinasi dan jejaring kerja antar unit layanan.
5. Mengoptimalkan unit layanan teknis terkait pelayanan pada masyarakat dalam suatu wadah peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak.
6. Meningkatkan komitmen dan pemahaman dari lintas sektor, masyarakat, akademisi, dunia usaha dan kelompok profesi lainnya untuk ikut berperan dalam kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak serta peduli terhadap masalah yang ada di lingkungan masing - masing.
7. Menyusun sistem pencatatan dan pelaporan, penanganan dan penyelesaian kasus tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang telah melaksanakan fungsinya dengan baik. Pada tahun 2018 ada 20 lembaga P2TP2A yang telah terbentuk dan semuanya telah berfungsi sebagaimana Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 9 tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu **:**

- Sebagai pusat informasi bagi perempuan dan anak.
- Pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- Pusat pemberdayaan bagi perempuan dana anak.

Rencana Tindak Tahun 2019 :

Sasaran	***Indikator***	***Program***	***Jumlah Anggaran 2019***
Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	- Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas.	- Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Rp. 208.662.775,-
	- Indeks Pembangunan Gender	- Program Peningkatan Hak, Perlindungan Perempuan dan Anak	Rp. 258,139,550,-

Sasaran 12 :
Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk

Jumlah penduduk merupakan salah satu indikator penting dalam suatu negara. Pertumbuhan penduduk memerlukan tambahan investasi dan sarana untuk mendukung kesejahteraan seperti sarana pendidikan, kesehatan, perekonomian dan lain sebagainya. Pengendalian penduduk masih sangat penting karena pertumbuhan dan jumlah penduduk yang besar bila tidak diikuti dengan daya dukung dan potensi wilayah yang memadai akan menjadi ancaman besar dalam segala hal.

Sasaran Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk merupakan sasaran yang menggambarkan upaya pemerintah Kabupaten Madiun melalui program dan kegiatan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Madiun. Adapun capaian kinerja indikator sasaran Penduduk tumbuh seimbang adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel : 3.1.2.12 :
Capaian Kinerja Sasaran Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk 2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2018 terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,30	0,305	0,31	99,9	0,30	0,30
	Rata-rata capaian kinerja				**99,9**		**99,9**

Sumber data: Dinas PPKB dan P3A

Untuk mencapai target Laju Pertumbuhan Penduduk telah dicanangkan program keluarga berencana dengan anggaran Rp. 7,098,938,800,-

Permasalahan

1. Masih rendahnya minat Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap alat kontrasepsi metode jangka panjang (MKJP).
2. Masyarakat masih mengharapkan pelayanan KB gratis, sampai saat ini meskipun alat kontrasepsi sudah gratis tetapi biaya pelayanan KB pada klinik belum gratis karena adanya perda tentang retribusi pelayanan bidang kesehatan.
3. Masih adanya perkawinan usia muda di wilayah tertentu dikarenakan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan reproduksi remaja kurang menjangkau pada masyarakat pedesaan yang agak terpencil dan kurangnya kepedulian terutama remaja terhadap kesehatan reproduksi remaja karena adanya pengaruh sosial media dan lingkungan sosial pergaulan terhadap pola hidup remaja.
4. Masih banyak kader Tri Bina yang merangkap tugasnya sehingga tugas pokok sebagai kader tidak dikuasai secara maksimal dan kegiatan penyuluhan maupun pembinaan kepada keluarga-keluarga belum menghasilkan perwujudan sebagai keluarga sejahtera sebagaimana yang diharapkan.
5. Kurangnya kapasitas SDM kader tribina, hal ini ditunjukkan dengan jumlah SDM pada tingkatan mandiri belum banyak dibanding jumlah kader yang ada.
6. Database kependudukan belum sepenuhnya akurat.

Rencana Tindak Tahun 2019 :

Sasaran	***Indikator***	***Kegiatan***	***Jumlah Anggaran 2019***
Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	-Laju Pertumbuhan Penduduk	- Program Keluarga Berencana - Program Pengendalian Penduduk	Rp. 6.260.951.008,- Rp. 1.792.555.370,-

Sasaran 13 :
Meningkatnya perkembangan dan pelestarian budaya

Arus Globalisasi dan masuknya budaya asing sangat mempengaruhi perilaku generasi muda. Banyak generasi muda yang telah meninggalkan atau kurang memahami budaya bangsa sendiri, oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan ketahanan budaya melalui pendidikan dengan strategi pengembangan dan pelestarian budaya. Pemerintah pusat telah menerbitkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 sebagai dasar pemerintah daerah untuk melaksanakan upaya pemajuan kebudayaan sesuai dengan kearifan lokal daerah masing-masing. Berikut ini adalah capaian indikator kinerja Meningkatnya Perkembangan dan Pelestarian Budaya :

Tabel : 3.1.2.13 :
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya perkembangan dan pelestarian budaya 2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2018 terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Jumlah Kelompok Seni	479	214	479	223,83	214	223,83
2	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	207	206	207	100,49	206	100,49
	Rata-rata capaian kinerja				**162,16**		**162,16**

Sumber data: Dinas Pedidikan dan Kebudayaan 2018

Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya perkembangan dan pelestarian budaya tahun 2018 sebesar 162,16 %, dengan interpretasi melebihi target 100%. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2018, masih tetap seperti capaian di 2017 dengan jumlah 207 buah. Realisasi Kinerja meningkatnya perkembangan dan pelestarian budaya tahun 2018 dapat dicapai karena ditunjang oleh Program Pengembangan Nilai Budaya dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.412.895.000,-

Strategi Pemecahan Masalah:

- Pengintegrasian seni dan budaya dan pendidikan karakter melalui kegiatan peningkatan pendidikan jalur formal, non formal dan informal sejak usia dini.
- Meningkatkan intensitas kunjungan siswa ke tempat sejarah dan situs cagar budaya.
- Melakukan pengelolaan kebudayaan melalui pelatihan, penyelenggaraan seni dan budaya.

Rencana Tindak Tahun 2019 :

Sasaran	***Indikator***	***Program***	***Jumlah Anggaran 2019***
Meningkatnya perkembangan dan pelestarian budaya	- Persentase budaya daerah yang dikembangkan - Persentase benda, situs, cagar budaya yang dikembangkan	- Program Pengembangan Nilai Budaya	Rp 675.000,000,-

Sasaran 14:
Meningkatnya kualitas infrastruktur dan penataan ruang

Dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan serta terciptanya keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas yang sehat dan dinamis serta perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemantapan pertahanan keamanan maka diperlukan pembangunan infrastruktur. Sasaran peningkatan infrastruktur merupakan sasaran yang mengukur tingkat keberhasilan upaya pemerintah Kabupaten Madiun dalam menmbangun infrastruktur. Capaian rata-rata sasaran peningkatan infrastruktur tahun 2017 adalah 116,62% dengan interpretasi tercapai target. Sasaran peningkatan infrastruktur terdiri atas 2 indikator sasaran sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel : 3.1.2.14 :
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kulaitas Infrastruktur dan penataan ruang tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2018 terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Persentase jembatan kondisi baik (%)	64,91	50,30	64,91	129.04	50,30	129.04
2	Persentase jembatan kondisi baik (%)	93,97	94,83	93,97	99,09	94,83	99,09
3	Persentase Jalan Lingkungan Pemukiman Dalam Kondisi Baik	50	49,73	50	100,5	49,73	100,5
	Rata-rata capaian kinerja				**109,5**		**109,5**

Sumber data: DINAS PUPR tahun 2017

Indikator Panjang jalan kondisi baik capaian kinerja Persentase jembatan kondisi baik (%) pada tahun 2018 sebesar 129,04% dengan interpretasi telah memenuhi target 100%, capaian kinerja Persentase jembatan kondisi baik pada tahun 2018 sebesar 99,09% dengan interpretasi belum memenuhi target 100% dengan jumlah jembatan kondisi baik sebanyak 218 buah, dibandingkan dengan total jembatan di Kabupaten Madiun sejumlah 232 buah., selanjutnya capaian kinerja Persentase Jalan Lingkungan Pemukiman Dalam Kondisi Baik pada tahun 2018 sebesar 50% dengan interpretasi telah memenuhi target 100%

Berikut ini adalah diagram jalan kondisi baik tahun 2012 s/d 2018:

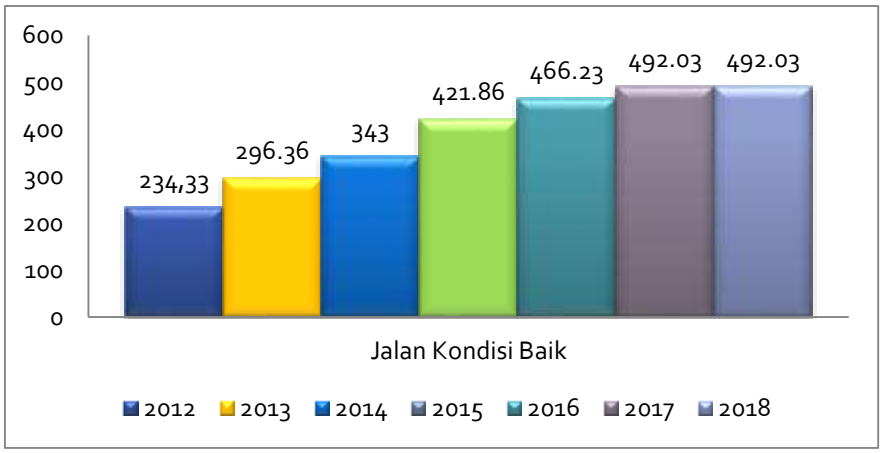

Sumber Data: Dinas PUPR

Permasalahan:

Kerusakan tersebut diakibatkan karena beberapa faktor, di antaranya adalah usia aspal jalan yang sudah tua, intensitas kendaraan yang melebihi tonase, ataupun faktor alam. Sehingga kondisi jalan yang baik hanya sekitar 64,91 persen dari panjang total 998,25 kilometer. Keterbatasan anggaran bagi pembangunan infrastruktur jalan.

Strategi Pemecahan Masalah:

- Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur jalan.
- Meningkatkan kualitas jaringan transportasi melalui pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan infrastruktur transportasi dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha..

Rencana Tindak Tahun 2019:

Sasaran	***Indikator***	***Kegiatan***	***Jumlah Anggaran 2019***
Meningkatnya kualitas infrastruktur dan penataan ruang	- Persentase panjang jalan kondisi baik. - Presentase Jembatan Kondisi Baik. - Presentase Jalan Lingkungan pemukiman kondisi baik	- Program Peningkatan jalan & jembatan - Program Pembangunan Jalan dan Jembatan. - Program Rehabilitasi /pemeliharaan jalan/jembatan. - Program Pembangunan Insfrastruktur Pedesaan/Kelurahan.	Rp. 67,313,430,098,- Rp. 3,013,000,000,- Rp. 10,466,791,500,- Rp. 12,791,306,421,-

Sasaran 15 :
Meningkatnya potensi kepariwisataan

Wisata Waduk Widas di Kecamatan Saradan

Sektor Pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dan penggerak perekonomian daerah. Banyak potensi pariwisata di Kabupaten Madiun masih belum optimal pengelolaannya. Sebagian besar destinasi wisata masih mengandalkan wisata alam seperti: obyek wisata waduk widas, wana wisata Grape, monumen Kresek, taman rekreasi Umbul, air terjun Kedung Malem, dan peninggalan sejarah Nglambangan. Capaian kinerja sasaran meningkatnya potensi pariwisata diukur dengan 1 (satu) indikator sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel : 3.1.2.15 :
Capaian Kinerja Sasaran Potensi Kepariwisataan
Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2018 terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	0,03	0,04	0,04	100	100%	100
	Rata-rata capaian kinerja				**100**		**100**

Sumber data: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 2018

Pada tahun 2018 kunjungan wisatawan di Kabupaten Madiun sebanyak 544.781 meningkat pada tahun 2017, meningkat 60.876 wisatawan atau 12,58 % di banding tahun 2017 sebanyak 483.906. Pada tahun 2018 peningkatan kunjungan wisatawan tersebut ditunjang dengan program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan realisasi Rp. 1.640.156.900,-, program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan realisasi anggaran Rp. 3.423.253.200,- dan Program Pengembangan Kemitraan dengan realisasi sebesar Rp. 668.020.000,-

Wisata Sejarah Monumen Kresek

Berikut ini adalah strategi dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Madiun:

Pengembangan pariwisata sebagai kawasan perekonomian dan kawasan perlindungan;

- Kawasan SSWP 1, meliputi Kawasan wisata Waduk Widas, Waduk Saradan, Kedung brubus, Notopuro dan Dawuhan.
- Kawasan SSWP 3, meliputi Kawasan wisata Taman Rekreasi Umbul, wisata agro dan hutan.
- Kawasan SSWP 4, meliputi Kawasan Wisata Monumen Kresek, Air Terjun Kedung Malem dan Seweru, Wisata Hutan Grape dan Segulung, dan Rencana Kawasan Wisata Waduk Kresek.

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Perkembangan Bidang Pariwisata Di Kabupaten Madiun

Uraian	Tahun								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
JumlahObyekWisata (buah)									
- Alam	4	4	4	4	4	4	4	8	18
- Buatan	5	5	5	5	5	5	5	7	8
- Sejarah	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Hotel non Bintang	5	4	4	4	4	4	4	4	6
Wisatawan Domestik (orang)	111.733	112.902	282.604	291.559	352.908	357.912	383.299	483.906	544.781

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2018

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah

sebagai berikut :

- Pembekalan Raka Raki tentang Potensi Pariwisata Kabupaten Madiun sebagai upaya promosi bidang kepariwisataan.
- Pembinaan dalam bentuk pelatihan bagi pedagang disekitar obyek wisata.
- Promosi Pariwisata dalam skala lokal, regional dan nasional, dalam bentuk leaflet, brosur, surat kabar dan even-even pariwisata.
- Peningkatan sarana dan prasarana di obyek wisata sebagai daya tarik bagi wisatawan.

Hambatan/Masalah:

- Kurangnya pengetahuan pengayaan jenis kuliner yang diperdagangkan dengan menggunakan potensi SDA lokal.
- Sarana dan prasarana obyek pariwisata yang belum sepenuhnya memadai.
- Keterbatasan pengetahuan SDM pengelola obyek wisata.

Strategi Pemecahan Masalah :

- Meningkatkan koordinasi dengan semua pihak yang terkait .
- Meningkatkan promosi terhadap destinasi pariwisata.
- Membuat rencana induk pengembangan pariwisata

Rencana Tindak Tahun 2019 :

Sasaran	***Indikator***	***Kegiatan***	***Jumlah Anggaran 2019***
Meningkatnya potensi kepariwisataan	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	- Program pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata - Program Pengembangan Kelembagaan dan Pemasaran Pariwisata - Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Pariwisata	Rp. 4.860.537.982,- Rp. 2.085.160.190,- Rp. 1.300.000.000,-

Sasaran 16 :
Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepa dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu, indikator yang digunakan diantaranya adalah

a. Indeks Kualitas / Pencemaran Air
b. Indeks Kualitas / Pencemaran Udara
c. Indeks Tutupan Hutan / Lahan

Pemerintah Kabupaten madiun memiliki sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang mesti dicapai melalui beberapa program yang telah ditetapkan, diantaranya Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah, Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dengan perhitungan indikator kinerja yang telah tercapai sesuai dengan penjelasan pada tabel dibawah ini :

Tabel : 3.1.2.16 :
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2018 terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75	74,05	75	98,7		98,7
2	Rasio Ruang Terbuka Hijau	33,58	9,14	33,58	369		369
	Rata-rata capaian kinerja						

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan :

- Dukungan tenaga teknis lingkungan berupa tenaga analis dan pengendali dampak lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup.
- Dukungan dari pengusaha/industri yang ikut berperan aktif dalam pelestarian lingkungan.

- Adanya dukungan dari instansi di Kabupaten Madiun (Kelurahan, Kecamatan, Dinas/OPD terkait) yang ikut membantu dalam penyelesaian pencemaran lingkungan.
- Adanya dukungan dari instansi laboratorium kualitas air yang telah terakreditasi.

Permasalahan :

Terdapat pelaku usaha atau industri dan beberapa rumah tangga yang kurang peduli dalam pelestarian lingkungan.

Strategi Pemecahan Masalah :

- ✓ Memberi penjelasan pada pelaku pencemaran lingkungan terhadap dampak pencemaran tersebut.
- ✓ Melakukan tinjau lapangan pada pelaku usaha dan rumah tangga – rumah tangga agar memahami makna dalam pelestarian lingkungan.
- ✓ Melakukan koordinasi dengan instansi di Kabupaten Madiun (Kelurahan, Kecamatan, Dinas/OPD terkait) untuk ikut membantu dalam penyelesaian pencemaran lingkungan.
- ✓ Melakukan sosialisasi dengan pengusaha/industri dalam pelestarian lingkungan hidup
- ✓ Melakukan koordinasi dengan instansi laboratorium kualitas air yang telah terakreditasi

Rencana Tindak Tahun 2019 :

Sasaran	***Indikator***	***Program***	***Jumlah Anggaran 2019***
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) - Rasio Ruang Terbuka Hijau	- Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup - Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam. - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah dan Limbah Domestik - Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp 954,950,670,- Rp 815,148,856,- Rp 2,156,189,535,- Rp 3,166,583,255,-

Sasaran 17 :
Meningkatnya iklim pengembangan dunia usaha / Investasi

Pembangunan ekonomi mempunyai arti pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi serta melalui penambahan kemampuanberorganisasi dan manajemen. Di Kabupaten Madiun sektor perdagangan kebanyakan dijalankan oleh usaha kecil dan menengah (UKM). Peranan sektor perdagangan sangat penting, terutama dalam menarik pembangunan sektor-sektor lainnya.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Madiun mencantumkan pengembangan dunia usaha sebagai salah satu sasaran pembangunan. Sasaran meningkatnya iklim pengembangan dunia usaha diukur dengan 2 indikator sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel : 3.1.2.17 :
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Iklim Pengembangan Dunia Usaha / Investasi Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2018 terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Jumlah Investor (PMDN/PMA)	428	420	428	107	428	107
2	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA) (Rp)	376.938.367.000	79.244.206.600	416,858,337,000	526,04	79.244.206.600	526,04
	Rata-rata capaian kinerja				**316,52**		**316,52**

Sumber data: DPMPTSP Kab. Madiun, Tahun 2018

Kemampuan dan peranan usaha menengah dan kecil, termasuk usaha tradisional dan informal di Kabupaten Madiun ditingkatkan melalui pembangunan prasarana dan sarana usaha disertai dengan pengembangan iklim usaha yang mendukung. Struktur dunia usaha ditata pula sehingga tercipta lapisan usaha kecil yang kukuh yang saling menyangga dengan lapisan

menengah yang tangguh dan saling mendukung dengan usaha besar.

Kebijaksanaan yang mendukung pengembangan ekonomi rakyat dilakukan pula melalui peningkatan pemberian kemudahan di bidang perkreditan, investasi, perpajakan, asuransi, akses terhadap pasar dan informasi, serta dalam memperoleh pendidikan, pelatihan keterampilan, bimbingan manajemen, dan alih teknologi. Dengan demikian, ekonomi rakyat dapat berkembang secara mantap dan berperan makin besar dalam perekonomian nasional. Dalam rangka itu dikembangkan bidang kegiatan ekonomi yang diprioritaskan bagi usaha ekonomi rakyat, yaitu koperasi dan usaha kecil termasuk usaha informal dan tradisional, dan jika perlu ditetapkan wilayah usaha yang menyangkut perekonomian rakyat.

Sasaran 18 :
Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat

Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan kegiatan ada dua yaitu Pengawasaan dan evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja dengan Jumlah dana Sebesar Rp. 1.052.800.000,- dan Patroli Wilayah dan Aset Daerah dengan jumlah dana sebesar Rp. 36.000.000,- dari Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan 2 kegiatan terserap dana dengan prosentase sebesar 54 % untuk kegiatan Pengawasan dan evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja dan dana terserap 61% untuk kegiatan Patroli Wilayah dan Aset Daerah.

Tabel : 3.1.2.18 :
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat tahun2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2018 terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Persentase Penangan Pelanggaran Perda	50	100	85,71	85,71	100	90
2	Angka Kriminalitas	300	235	231	100	235	100
	Rata-rata capaian kinerja				**75**		**90**

Sumber data: SatPol PP 2018

Berdasarkan capaian kinerja tersebut, beberapa upaya meminimalisir kegagalan serta mengatasi kendala atau penyebab kegagalan sebagai langkah peningkatan realisasi kinerja tahun mendatang, maka langkah-langkah yang diambi antara lain:

a. Mengadakan kegiatan sosialisasi peraturan perundang undangan yang di dalamnya berisi materi materi tentang Perda dan Perbup yang ada di Kabupaten.

b. Mengajukan permohonan ke Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan untuk menambah jumlah personil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten.
c. Menjalin koordinasi lebih baik dengan instansi vertikal lain untuk kelancaran dalam melaksanakan program dan kegiatan terkait ketentraman dan ketertiban Masyarakat.

Faktor pendorong keberhasilan:

- Dukungan anggaran pengadaan sarana dan prasarana perhubungan baik APBD maupun APBN, maupun bantuan dari Provinsi Jawa Timur.
- Kesadaran masyarakat untuk ikut memelihara sarana prasarana yang ada, dengan tidak merusak dan mengambil rambu yang sudah terpasang.

Permasalahan:

- Rendahnya pengetahuan aparatur terhadap produk hukum daerah serta Standard Operasional Prosedur sebagai pedoman pelaksanaan tugas di lapangan.
- Belum mendukungnya jumlah petugas PPNS di lingkungan Satpol PP.
- Belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung mobilitas anggota yang memadai dalam rangka pemeliharaan trantibum yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Madiun.

Strategi Pemecahan Masalah:

1. Adanya kelompok jabatan fungsional yang memberikan keleluasaan dan fleksibel dalam proses penegakkan, pemeliharaan serta menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
2. Terjalinya kerjasama di bidang keamanan dan ketertiban semua pihak untuk menciptakan masyarakat Madiun yang cinta akan persatuan , kedamaian dan kesejahteraan lahir batin.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam fungsi perlindungan masyarakat makin mendapat landasan yuridis yang kuat karena perlindungan masyarakat di bidang keamanan dan ketertiban tidak hanya bersubstansi fungsi tetapi merupakan komponen khusus pertahanan keamanan rakyat semesta.

Rencana Tindak Tahun 2019:

Sasaran	***Indikator***	***Program***	***Jumlah Anggaran 2019***
Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	- Persentase Penangan Pelanggaran Perda - Angka Kriminalitas	- Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan - Program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Rp. 128.600.000,- Rp. 1.088.800.000,-

Sasaran 19:

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, transparan dan akuntabel

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil *(outcome)*. Pemerintah Kabupaten Madiun menetapkan sasaran. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, transparan dan akuntabel diukur dengan 2 (dua) indikator

Tabel : 3.1.2.19 :
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, transparan dan akuntabel tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2018 terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Predikat Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	B	B	BB	100	B	100
2	Peringkat Nasional Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	41	24	41	80	24	80
	Rata-rata capaian kinerja				**90**		**90**

Sumber data: Inspektorat dan Bagian Organisasi

1. Predikat Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

   Progres nilai penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Madiun mengalami peningkatan. 2016-2017 dengan nilai SAKIP B, tahun 2018 mengalami kenaikan predikat BB. SAKIP (SIstim Akuntabilitas Instansi Pemerintah) Pemerintah Kabupaten Madiun melewati target yang telah ditentukan yakni mendapatkan BB dari target yang ditentukan yaitu B.

2. Peringkat Nasional Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

   Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan sebuah laporan pertanggung jawaban atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 tahun

anggaran penuh telah terlalui dan dilaporkan pada bulan maret tahun anggaran selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Madiun pada tahun 2018 mendapatkan peringkat LPPD dengan nomor 41, peringkat tersebut belum mencapai target RPJMD yang telah ditentukan yakni perinkgat 24 secara nasional.

Permasalahan:

- Belum semua OPD melaksanakan upgrade data pada e SAKIP.
- Masih minimnya pemahaman petugas pelaporan Laporan Kinerja pada tingkatan OPD dikarenakan Lambat menyesuaikan dengan Perubahan SOTK.

Strategi Pemecahan Masalah:

- Input data pencapaian IKU OPD pada e SAKIP
- Meningkatkan peran serta petugas pelaporan tingkatan OPD dalam hal kontribusi penyusunan LKJ Kabupaten Madiun.
- Membentuk Forum komunikasi antar petugas pelaporan sehingga mampu saling bertukar informasi antara satu petugas dengan rekan yang lainnya.

Sasaran 20 :
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan

Publik merupakan obyek layanan aparatur perangkat daerah yang harus dilayani dengan baik dan tepat waktu. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik merupakan implementasi misi ke 2 RPJMD tahun 2013-2018 yaitu mewujudkan peningkatan kualitas kinerja Aparatur Perangkat Daerah. Sasaran tersebut menggambarkan upaya Pemerintah Madiun dalam mewujudakan kualitas sumberdaya dan pelayanan aparatur yang handal, cepat, tepat waktu dan akuntabel. Upaya tersebut berdampak pada perubahan *mindset* aparatur melalui pelaksanaan reformasi birokrasi. Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan tahun 2018 adalah sebesar 94 %, yang diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel : 3.1.2.20 :
Capaian Kinerja Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD (2018)	Capaian s/d 2016 terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	72,86	82	77.76	94	82	94
	Rata-rata capaian kinerja				**94**		**94**

Sumber data : Bagian Organisasi 2018

Capaian kinerja IKM adalah 94%, dengan rincian target OPD yang melaksanakan IKM sebanyak 15 OPD, dan terealisasi 18 OPD. Dengan rata-rata nilai IKM sebesar : 71,88. Berikut ini adalah tabel survey IKM tahun 2013 s/d 2018:

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah OPD yang disurvey IKM	6	16	17	18	15	18
Nilai IKM	75,91	65,03	65,06	71,88	72,86	77,76

Permasalahan:

- Kurang optimalnya Organisasi Perangkat Daerah dalam menerapkan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- Belum di bentuknya Tim atau petugas pelayanan pengaduan terkait pelayanan publik
- Sistem Informasi Pelayanan Publik belum dipublikasikan

Strategi Pemecahan Masalah :

- Mengevaluasi dan mereview Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- Membentuk tim ataupun petugas pelayanan pengaduan terhadap pelayanan publik

Rencana Tindak Tahun 2019:

Sasaran	***Indikator***	***Program***	***Jumlah Anggaran 2019***
Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	- Indeks Kepuasan Masyarakat	- Program Peningkatan Pelayanan Publik	Rp. 730,943,600,-

1.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN TAHUN 2018 :

Proses capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun tahun 2018 sebagaimana Perjanjian Kinerja Bupati Madiun tahun 2018, bermuara pada pencapaian indikator kinerja tujuan pemerintah Kabupaten Madiun yang terdiri atas:

A. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

Sasaran pertumbuhan ekonomi merupakan sasaran yang menggambarkan struktur perekonomian Kabupaten Madiun yang terbangun dari 9 sektor, baik primer yaitu pertanian, pertambangan dan penggalian, sektor sekunder yang terdiri atas industri pengolahan, listrik dan air bersih, sedangkan sektor tersier terdiri atas perdagangan, hotel & restoran, angkutan dan komunikasi,keuangan,persewan & jasa perusahaan serta jasa-jasa.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Madiun Pada tahun 2017 kinerja ekonomi sedikit melambat dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5, 16%. Melambatnya kinerja ekonomi pada periode tersebut akibat penurunan yang terjadi pada sektor pertanian yang merupakan sektor yang memberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB. Selain itu kenaikan harga komoditi sebagai akibat meningkatnya harga BBM sehingga memberikan tekanan pada pelaku ekonomi. Begitu juga pada pertumbuhan ekonomi Prov. Jatim juga mengalami perlambatan sebagaimana grafik di bawah:

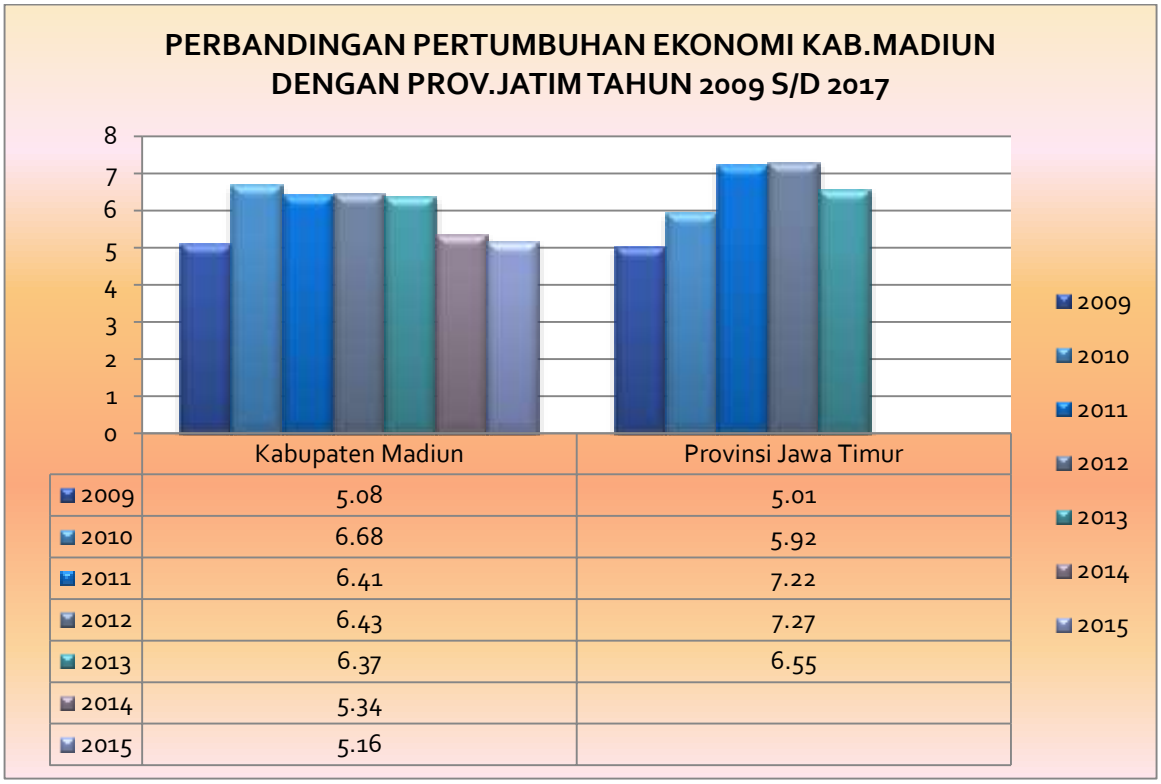

	Kabupaten Madiun	Provinsi Jawa Timur
2009	5.08	5.01
2010	6.68	5.92
2011	6.41	7.22
2012	6.43	7.27
2013	6.37	6.55
2014	5.34	
2015	5.16	

Sumber: BPS Kabupaten Madiun tahun 2018

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi haruslah dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Madiun dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi, dilaksanakan juga percepatan kemajuan pedesaan yang didukung 2 Satuan Wilayah Pengembangan (SWP), sebagaimana termaktup dalam Keputusan Bupati No.271 tahun 2005 tentang penetapan lokasi pengembangan Kawasan Agropolitan" Gedangsari" dengan harapan :

- Untuk pengembangan sumber daya manusia.
- Terbentuknya klasterisasi
- Terbangunnya sistem usaha agribisnis.

B. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia

Sasaran meningkatnya IPM merupakan sasaran untuk mengetahui tingkat pencapaian dampak pembangunan manusia bagi penduduk yang diukur dari dimensi umur panjang dan sehat, Dimensi Pengetahuan, Dimensi kehidupan yang layak. Capaian sasaran meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu IPM. Berikut ini perbandingan realisasi kinerja indikator tujuan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia tahun 2011 s/d 2016:

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2011-2017
Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur dan Nasional

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	IPM Kab. Madiun	67,32	68,07	68,60	69,39	69,67	70,27
2	IPM Jawa Timur	66,74	67,55	68,14	68,95	69,74	70,27
3	IPM Nasional	-	68,31	68,90	69,55	70,18	70,81

Sumber : BPS Kabupaten Madiun, 2018

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidupyaitu kombinasi dari indikator-indikator

seperti kesehatan, kekayaan dan pendidikan.Indeks pembangunan manusia Kabupaten Madiun dari tahun ke tahun meningkat akan tetapi kurang signifikan. Peningkatan tersebut tidak terlalu signifikan, namun setiap tahun terus menunjukkan peningkatan yang positif. Kenaikan IPM ini dapat dipahami mengingat dampak dari program yang digulirkan baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah pada sektor kesehatan dan pendidikan khususnya terhadap indikator penyusunan IPM terlihat secara nyata dalam jangka panjang.Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Madiun dari tahun ke tahun mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Madiun.

Permasalahan :

a. Angka rata-rata lama sekolah masih rendah
b. Pemerataan aksesibilitas fasilitas dan tenaga medis belum optimal
c. Menurunnya angka kesempatan kerja.

Strategi Pemecahan Masalah:

a. Memberikan perhatian dengan menyiapkan program kegiatan yang mendorong peningkatan pencapaian IPM erutama pada 3 indikator yang capaiannya rendah yaitu: angka melek huruf, angka rata – rata lama sekolah sekolah dan angka harapan hidup.

C. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Ketenagakerjaan merupakan gambaran aktifitas masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dan kelancaran perekonomian. Ketenagakerjaan merupakan aspek penting, tidak hanya untuk mencapai kepuasan individu, tetapi juga untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan masyarakat. Dari tahun ke tahun pertumbuhan penduduk di Kabupaten Madiun semakin meningkat dengan persebaran penduduk yang tidak merata dan minimalnya lapangan pekerjaan mengakibatkan permasalahan pada ketenagakerjaan di Kabupaten Madiun.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Madiun pada tahun pada 2012 s/d 2017 sebagaimana tabel di bawah ini :

2013	2014	2015	2016	2017
4,70%	3,38%	6,90	6,86	6,72

D. Meningkatkan pendapatan perkapita

LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN MADIUN ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010
MENURUT LAPANGAN USAHA (PERSEN), 2012-2017

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.15	2.05	2.50	2.64	2.55	1,27
B	Pertambangan dan Penggalian	0.42	0.71	1.11	1.18	4.05	5,35
C	Industri Pengolahan	5.00	6.48	5.73	6.43	6.05	7,69
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10.07	6.21	7.57	1.84	2.47	4,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.08	6.37	2.99	4.53	5.02	5,86
F	Konstruksi	6.97	8.30	8.14	5.98	7.11	10,19
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.85	8.82	7.48	6.84	6.84	7,29
H	Transportasi dan Pergudangan	8.36	11.15	10.93	8.13	6.58	7,64
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.97	6.18	7.04	7.52	8.70	8,76
J	Informasi dan Komunikasi	10.29	10.84	10.31	8.69	7.63	7,31
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8.89	12.10	7.14	7.16	7.32	7,00
L	Real Estate	5.98	7.56	6.45	6.24	6.17	7,21
M,N	Jasa Perusahaan	5.22	7.14	7.31	7.38	5.53	5,76
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.63	1.94	1.39	4.89	4.52	2,23
P	Jasa Pendidikan	5.29	6.72	5.22	6.40	5.96	6,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.27	6.44	5.27	6.09	5.81	5,33
R,S,T,U	Jasa lainnya	3.65	6.45	6.05	4.76	4.81	6,05
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		6.02	6.12	5.67	5.34	5.27	5,42
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		6.02	6.12	5.67	5.34	5.27	5,42

Sumber: BPS Kabupaten Madiun tahun 2018

* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

E. Penilaian terhadap laporan keuangan daerah

Bentuk Pertanggungjawaban APBN/APBD atau Pengelolaan Keuangan Negara baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah adalah berupa penyajian Laporan Keuangan Pemerintah yang telah diperiksa oleh BPK untuk menjamin relevansi dan keandalan informasi-informasi yang disajikan didalamnya. Setelah disampaikan kepada lembaga perwakilan (DPR/DPRD), Laporan Keuangan Pemerintah ini selanjutnya dipublikasikan kepada rakyat sebagai pengguna laporan keuangan sekaligus pemilik dana yang digunakan oleh pemerintah tersebut.

Laporan keuangan pemerintah ini kemudian akan dibaca, dinterpretasikan dan digunakan sebagai dasar rakyat menilai kinerja pemerintah, khususnya dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan, termasuk mengelola keuangan negara/daerah. Untuk melakukan penilaian terhadap pertanggungjawaban uang rakyat inilah, rakyat harus memahami tata cara pelaporan keuangan pemerintah.

Berikut ini adalah tabel Penilaian terhadap laporan keuangan daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013 s/d 2018 sebagai berikut:

2013	2014	2015	2016	2017	2018
WTP	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**Dalam Proses**

3.2. REALISASI ANGGARAN

a. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Secara mendasar pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2018 berpijak pada serangkaian peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dalam Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 tetap berorientasi pada Anggaran berbasis kinerja/ prestasi kerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran/hasil dari kegiatan/ program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dalam hal ini setiap dana yang dianggarkan untuk melaksanakan program/kegiatan harus terukur secara jelas indikator kinerjanya yang direpresentasikan kedalam tolok ukur kinerja serta target/ sasaran yang diharapkan.

Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2018, yaitu :

a. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
b. Pembahasan dan Penetapan kesepakatan bersama mengenai KUA antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.
c. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
d. Pembahasan dan Penetapan kesepakatan bersama mengenai Prioritas Plafon Anggaran (PPA) antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.
e. Penyusunan dan penyampaian Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-OPD kepada seluruh OPD.
f. Pembahasan RKA-OPD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan OPD.
g. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
h. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
i. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
j. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja OPD memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan dan Kewajiban Daerah, Rencana Kerja yang terukur dan Pendanaannya, baik yang dialksanakan langsung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD yang telah tersusun dipakai sebagai dasar untuk menyusun Kebijakan Umum

APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya disampaikan kepada DPRD kemudian disepakati menjadi PPA. KUA dan PPA yang disepakati dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD.

Sumber pendanaan pembangunan di Kabupaten Madiun bersumber pada :

Tabel III.2 Rencana dan Realisasi Pendapatan Tahun 2018

NO	KOMPONEN	RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
1.	Pendapatan Asli Daerah	211.675.179.290,80	219.041.413.266,71	103,4
2.	Dana Perimbangan	1.278.358.282.850	1.286.346.821.945	100,6
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	428.423.257.071,80	254.295.303.183	59,35
JUMLAH		**1.918.456.719.211,98**	**1.759.683.538.394,63**	**87,78**

Adapun Rekapitulasi Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

NO	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,152,643,797,784.13	1,082,185,337,372.00	93,88
2.	BELANJA LANGSUNG	765,812,921,427.85	677,498,201,022.63	88,46
JUMLAH		1.918.456.719.211,98	1.759.683.538.394,63	91,72

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/ kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan serta untuk melihat tingkat efisiensi penggunaan anggaran tahun 2018 sebagaimana terlampir :

3.3. PRESTASI KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018

1. Penghargaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017 dengan predikat B dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Penghargaan diterima Wakil Bupati Madiun dari Menpan RB RI di Bali Convention Center Nusa Dua Bali pada 31 Januari 2018.

2. Penghargaan atas Prestasi Kinerja Status Sangat Tinggi dengan skor 3,3267 dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016 Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100 - 53 Tahun 2018 tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional. Diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Madiun pada upacara peringatan Hari Otonomi Daerah XXII Tingkat Jawa Timur yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2018 bertempat di halaman Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan Surabaya.

3. Penerimaan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Penghargaan diterima Bupati Madiun dari Plt. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Jalan Juanda Sidoarjo pada 31 Mei 2018.

4. Penghargaan MANGGALA KARYA KENCANA, adalah penghargaan dari pemerintah pusat melalui BKKBN kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Madiun yang dinilai memiliki dedikasi tinggi terhadap program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Diserahkan dalam rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional XXV Tahun 2018 yang dilaksanakan di Graha Bumi Beringin Manado pada 6 Juli 2018.

5. PENGHARGAAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) Kategori Madya Tahun 2018 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI. Penghargaan ini diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI kepada Kabupaten Madiun yang dinilai mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Diserahkan dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional tahun 2018 di Dyandra Convention Hall Surabaya pada 23 Juli 2018.

6. Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi RI dengan mengambil tema "Simpatik Anak Cerdik" kerjasama antara Puskesmas Klegenserut Kecamatan Jiwan dengan MIN 01 Jiwan, yakni untuk memantau jentik dilingkungan sekitarnya sebagai penyebab penyakit malaria dan demam berdarah. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi kepada Pj. Bupati Madiun di Hotel Sangrila Surabaya pada 19 September 2018.

7. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 dari Menteri Keuangan RI. Penghargaan ini diserahkan oleh Direktur Pelaksana Anggaran Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI di Kantor Gubernur Jawa Timur pada tanggal 28 September 2018.

8. Penghargaan Lomba Desa Tangguh Bencana Tingkat Provinsi Jawa Timur Kategori Pratama Bidang Administrasi dan Legislasi untuk Desa Mendak Kecamatan Dagangan. Penghargaan diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Madiun pada upacara Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-73 di Gedung Negara Grahadi Surabaya tanggal 12 Oktober 2018.

9. Peringkat III Diklat Award untuk BKD Kabupaten Madiun. Penghargaan diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Madiun pada upacara peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-73 di Gedung Negara Grahadi Surabaya tanggal 12 Oktober 2018.

10. Penghargaan Top 25 Kovablik 2018 Otonomi Award dan Good Practices Award kategori Kolaborasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik untuk Puskesmas Bangunsari Desa Dolopo Kecamatan Dolopo. Penghargaan diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Madiun pada Malam Penganugerahan Top 25 Kovablik 2018 dan Good Practices Award di Hotel Shangri La Surabaya pada 22 Oktober 2018.

11. Terbaik III kategori daya tarik wisata alam untuk Watu Rumpuk Desa Mendak Kecamatan Dagangan. Penghargaan diserahkan oleh Sekda Provinsi Jawa Timur kepada Wakil Bupati Madiun pada Malam Anugerah Wisata Jawa Timur Tahun 2018 di Mercure Grand Mirama Hotel Surabaya pada tanggal 23 Oktober 2018.

12. NATIONAL PROCUREMENT AWARD (NPA) 2018, penghargaan kategori Komitmen Penerapan Standar LPSE dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa (LKPP). Penghargaan diserahkan oleh Kepala LKPP kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun di Sabuga Centre Institut Teknologi Bandung pada tanggal 30 Oktober 2018.

13. ANUGRAH PARAHITA EKAPRAYA (APE) Kategori Madya, penghargaan kepada kementerian/lembaga serta pemerintah daerah yang telah berupaya dan berkomitmen melaksanakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG). Diserahkan oleh Wakil Presiden RI dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Wakil Bupati Madiun di Istana Wakil Presiden RI di Jakarta pada 19 Desember 2018.

BAB IV
PENUTUP

PENUTUP

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan, dan membangkitkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan berbagai kewajiban pembangunan yang meliputi seluruh urusan pemerintahan, maka Pemerintah Kabupaten Madiun berupaya mewujudkannya dalam Laporan Kinerja tahun 2018.

Laporan Kinerja Kabupaten Madiun tahun 2018 ini merupakan dokumen yang menggambarkan berjalannnya tahapan akhir dari suatu siklus Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun, dan juga mencerminkan kinerja pelayanan kepada masyarakat secara bertanggungjawab, mudah ,cepat dan transparan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah secara efisien dan efektif.

Laporan Kinerja tahun 2018 ini merupakan Laporan Kinerja tahun kelima (5) RPJMD 2013 - 2018, sehingga di dalamnya disajikan pula capaian kinerja sejak tahun 2013 hingga 2018, keberhasilan dan kekurang tercapainya beberapa target dari indikator sasaran yang ada. Beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Madiun kedepan, walaupun beberapa IKU telah mencapai target lebih dari 100%, akan tetapi persoalan-persoalan di

masyarakat terutama bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat menjadi pekerjaan rumah pemerintah Kabupaten Madiun secara terus menurus.

Pentingnya koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Madiun dengan berbagai unsur terhadap pencapaian Beberapa sasaran seperti peningkatan pendapatan, peningkatan jumlah dan lama tinggal wisatawan, pertumbuhan ekonomi menunjukkan pentingnya kontribusi dan koordinasi dengan dunia usaha dan juga masyarakat. Tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Bagi instansi di lingkungan Pemda Kabupaten Madiun sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Harapan kami dengan laporan akuntabilitas kinerja ini bukan hanya menggambarkan berbagai capaian kinerja yang telah menjadi komitmen di tahun 2018, namun dapat juga mencerminkan keselarasan dan keterkaitannya dengan dokumen yang dihasilkan pada tahapan sebelumnya pada siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.

"Sempurna" adalah harapan kami, selanjutnya baik dalam hal penyajian Laporan Kinerja Kabupaten Madiun, capaian kinerja, maupun penerapan sistim AKIP senantiasa memerlukan penyempurnaan, agar terwujud akuntabilitas yang ingi diwujudkan bersama, untuk itu diperlukan peran aktif masyarakat dari berbagai pihak yang berkepentingan.

Pada masa yang akan datang Laporan kinerja ini diharapkan bukan hanya dalam rangka memenuhi kewajiban akuntabilitas, namun dapat memenuhi fungsinya sebagai informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Madiun.

Upaya pemenuhan fungsi sebagai sumber informasi tersebut diantaranya dalam Laporan Kinerja telah disajikan data dan pengukuran kinerja yang dapat diperbandingkan dengan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya sebagaimana yang diharapkan dalam RPJMD 2013-2018. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018. Perubahan yang dilaksanakan sebagai wujud keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dalam menyempurnakan, menindak lanjuti, dan meningkatkan Kinerja Pemerintah Kabupaten Madiun.

Lampiran 1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KABUPATEN MADIUN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kesejahteraan petani	NTP	110,47
2	Berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah dan berkembangnya kehidupan koperasi sebagai penyangga ketahanan UMKM	Persentase Penambahan UMKM (%)	0
		Persentase Koperasi aktif	86
3	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PRDB	0
4	Meningkatkan ketersediaan pangan	Skor Pola Pangan Harapan	92,4 %
5	Meningkatnya kualitas pendidikan.	Angka Kelulusan	
		- SD/MI (%)	100%
		- SMP/MTs (%)	100%
		Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTS	95,45%
		Angka melanjutkan dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA	77,79%
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka kematian ibu (per 1000 KH)	102
		Angka kematian bayi (per 1000 KH)	8
		Angka kematian balita (per 1000 kh)	1,07
		Angka Usia Harapan Hidup	70,46
		Prosentase gizi buruk (%)	0,42
7	Meningkatnya kualitas kesejahteraan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	71,26
8	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat	Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa	15 %
9	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,1 %
10	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	0

		Jumlah Rumah Layak Huni (RLH)	184.168
		Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	0
11	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Tertangani	100%
		Indeks Pembangunan Gender	91,55 %
12	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,305
13	Meningkatnya kelembagaan kepemudaan dan prestasi olah raga	Jumlah Kelompok Seni	214
		Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	206
14	Meningkatnya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	50,3%
		Persentase Jembatan Kondisi Baik	94,8%
		Persentase Jalan Lingkungan Pemukiman Dalam Kondisi Baik	49,7%
15	Meningkatnya potensi kepariwisataan	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	0,04
16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,05
		Rasio Ruang Terbuka Hijau	9,14
17	Meningkatnya iklim pengembangan dunia usaha / investasi	Jumlah Investor (PMDN/PMA)	420
		Jumlah Nilai Investasi (PMDN/ PMA) (Rp)	Rp. 79.244.206.600,00
18	Meningkatnya ketertiban dan keamanan masyarakat	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda	100
		Angka Kriminalitas	234,65
19	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif,efisien, transparan dan akuntabel	Penilaian Predikat Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	B
		Peringkat Nasional Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	24
20	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	82

NO	PROGRAM	ANGGARAN	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	50,516,804,309.00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	28,134,457,550.00
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Rp	1,075,057,500.00
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp	2,809,240,400.00
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	5,830,060,500.00
6	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rp	9,251,300,000.00
7	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rp	24,849,466,592.00
8	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp	11,953,400,000.00
9	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp	1,348,225,000.00
10	Program Bantuan Operasional Sekolah	Rp	52,403,500,000.00
11	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp	62,935,000.00
12	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	26,941,479,000.00
13	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Rp	215,605,000.00
14	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp	2,299,984,000.00
15	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp	497,704,000.00
16	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp	895,083,500.00
17	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp	2,682,144,500.00
18	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp	224,575,700.00
19	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Rp	1,547,075,500.00
20	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	Rp	13,205,395,690.00
21	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Rp	11,143,000,000.00
22	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Rp	84,430,000.00
23	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Rp	189,260,000.00
24	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Rp	886,822,000.00
25	Program Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Rp	3,770,261,200.00
26	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Rp	378,718,500.00
27	Program Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelayanan Teknis	Rp	26,818,571,550.00
28	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah	Rp	55,465,386,600.00
29	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/	Rp	2,164,500,000.00
30	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	Rp	30,250,967,400.00
31	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Rp	67,237,770,115.00
32	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp	5,150,000,000.00
33	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Rp	3,752,000,000.00
34	Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp	15,358,100,000.00

35	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Rp	1,550,000,000.00
36	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Rp	44,364,374,000.00
37	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Rp	44,364,374,000.00
38	Program Pengendalian Banjir	Rp	7,089,600,000.00
39	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Rp	19,900,653,250.00
40	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah	Rp	26,001,048,000.00
41	Program Perencanaan Tata Ruang	Rp	61,500,000.00
42	Program Jasa Konstruksi	Rp	281,470,400.00
43	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp	1,646,350,000.00
44	Program Pengembangan Perumahan	Rp	1,293,487,000.00
45	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Rp	220,000,000.00
46	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp	7,350,073,000.00
47	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Rp	45,930,000.00
48	Program Pengelolaan Area Pemakaman	Rp	200,000,000.00
49	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp	911,400,000.00
50	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Rp	1,483,575,000.00
51	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Rp	200,000,000.00
52	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Rp	60,000,000.00
53	Program pendidikan politik masyarakat	Rp	2,177,840,000.00
54	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Rp	633,278,000.00
55	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp	1,894,143,500.00
56	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp	250,450,000.00
57	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Rp	300,000,000.00
58	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Rp	472,095,000.00
59	Program Pengembangan Kawasan Keagamaan	Rp	3,199,050,000.00
60	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp	882,880,000.00
61	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp	104,990,000.00
62	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp	320,260,000.00
63	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Rp	411,430,000.00
64	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Rp	1,535,141,100.00
65	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	Rp	78,100,000.00
66	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Rp	130,500,000.00
67	Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah	Rp	6,884,705,500.00

68	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp	3,293,804,300.00
69	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp	2,440,325,000.00
70	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp	2,736,691,550.00
71	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp	3,359,183,000.00
72	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rp	764,486,000.00
73	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Rp	469,795,000.00
74	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Rp	801,875,000.00
75	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Rp	361,675,000.00
76	Program Keluarga Berencana	Rp	7,098,938,800.00
77	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rp	150,000,000.00
78	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Rp	100,000,000.00
79	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Rp	981,120,000.00
80	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp	1,646,350,000.00
81	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Rp	387,500,000.00
82	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media	Rp	1,262,125,000.00
83	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan	Rp	509,740,000.00
84	Program kerjasama informasi dengan mas media	Rp	1,215,000,000.00
85	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang	Rp	114,800,000.00
86	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp	906,649,500.00
87	Pembinaan Lingkungan Sosial	Rp	680,000,000.00
88	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp	263,725,000.00
89	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp	445,682,000.00
90	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Rp	659,000,000.00
91	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Rp	44,000,000.00
92	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Rp	863,990,000.00
93	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Rp	50,000,000.00
94	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	Rp	196,855,000.00
95	Program Pengembangan Nilai Budaya	Rp	1,475,000,000.00
96	Program Pengembangan Minat Budaya Baca	Rp	1,123,700,000.00
97	Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	Rp	180,000,000.00
98	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Rp	227,000,000.00
99	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Rp	223,496,000.00
100	Program pengembangan budidaya perikanan	Rp	980,973,000.00
101	Program pengembangan perikanan tangkap	Rp	134,025,000.00
102	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi	Rp	85,500,000.00
103	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Rp	1,311,990,000.00
104	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rp	3,065,820,000.00
105	Program pengembangan Kemitraan	Rp	556,800,000.00
106	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rp	640,649,000.00
107	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Rp	241,930,000.00
108	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Rp	1,230,750,000.00

109	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Rp	2,351,775,000.00
110	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan	Rp	641,234,250.00
111	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Rp	181,650,000.00
112	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Rp	509,640,000.00
113	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Rp	424,820,000.00
114	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Rp	187,990,000.00
115	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	Rp	277,905,000.00
116	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Rp	16,644,879,300.00
117	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Rp	100,000,000.00
118	Program perlindungan konsumen dan pengamanan	Rp	1,448,156,500.00
119	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Rp	7,249,091,500.00
120	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Rp	100,000,000.00
121	Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar	Rp	1,147,850,000.00
122	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Rp	477,785,000.00
123	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Rp	23,425,000.00
124	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Rp	495,575,000.00
125	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala	Rp	1,427,686,000.00
126	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Rp	151,150,000.00
127	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Rp	30,000,000.00
128	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Rp	1,023,000,000.00
129	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp	681,575,000.00
130	Program Pengembangan Sistem Pertanggungjawaban Keuangan dan Kinerja Daerah	Rp	540,612,200.00
131	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Rp	12,979,385,000.00
132	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Rp	3,102,839,000.00
133	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan	Rp	2,435,518,000.00
134	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rp	2,265,385,000.00
135	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Rp	20,000,000.00
136	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Rp	50,000,000.00
137	Program perencanaan pembangunan daerah	Rp	4,572,428,500.00
138	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Rp	1,463,850,000.00
139	Program perencanaan sosial dan budaya	Rp	866,430,000.00
140	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp	8,763,345,600.00
141	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan	Rp	153,000,000.00
142	Program Penelitian dan Pengembangan	Rp	825,000,000.00
	JUMLAH	**Rp**	**752,585,902,856.00**

Mejayan, Januari 2018
BUPATI MADIUN

Lampiran 2

TABEL EFISIENSI INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH

KABUPATEN MADIUN

TAHUN 2018

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	OPD
				TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN					
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Peani	1	Nilai Tukar Petani (NTP)	110.47	106.53	96.43	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	890,649,000	845,943,450	94.98	Dinas Pertanian dan Perikanan
							Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	241,930,000	191,737,500	79.25	Dinas Pertanian dan Perikanan
							Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1,135,520,800	1,121,608,290	98.77	Dinas Pertanian dan Perikanan
							Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	2,480,145,000	2,330,192,375	93.95	Dinas Pertanian dan Perikanan
							Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	187,990,000	187,990,000	100.00	Dinas Pertanian dan Perikanan
							Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	181,650,000	181,650,000	100.00	Dinas Pertanian dan Perikanan
							Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	250,000,000	246,042,650	98.42	Dinas Pertanian dan Perikanan
							Program Pengembangan Budidaya Perikanan	950,473,000	892,554,000	93.91	Dinas Pertanian dan Perikanan
							Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	85,500,000	80,679,250	94.36	Dinas Pertanian dan Perikanan
							Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan	639,884,250	606,423,800	94.77	Dinas Pertanian dan Perikanan
							Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	509,640,000	506,438,500	99.37	Dinas Pertanian dan Perikanan
							Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	442,820,000	314,342,500	70.99	Dinas Pertanian dan Perikanan
							INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRIGATION PROGRAM (IPDMIP)	75,000,000	55,025,000	73.37	Dinas Pertanian dan Perikanan
							Program pengembangan perikanan tangkap	134,025,000	128,305,000	95.73	Dinas Pertanian dan Perikanan
			Capaian Kinerja Rata-rata			96.43	Capaian Kinerja Rata-rata			91.99	Efisiensi
2	Berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah dan berkembangnya kehidupan koperasi sebagai penyangga ketahanan UMKM	1.	Persentase penambahan UMKM (%)	10.5	11	104.76	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	461,395,000	437,348,300	94.79	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
		2.	Persentase Koperasi aktif (Unit)	86	116	134.88	Program Penciptaan iklim usaha Kecil Menengah yang Kondusif	136,300,000	64,573,500	47.38	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
							Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	906,649,500	794,195,900	87.60	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
							Program Pembinaan Lingkungan Sosial	9,608,762,053	8,574,536,951	89.24	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

			Capaian Kinerja Rata-rata			119.82	Capaian Kinerja Rata-rata			79.75	Efisiensi
3	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap Pertumbuhan ekonomi	1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	15.75	16.52	104.89	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	7,285,591,500	6,409,731,064	87.98	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
							Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1,494,053,500	1,397,512,392	93.54	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
							Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar	967,850,000	877,822,506	90.70	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
							Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	100,000,000	96,413,300	96.41	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
			Capaian Kinerja rata-rata			104.89	Capaian Kinerja rata-rata			112.09	Efisiensi
4	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	1.	Skor pola pangan harapan (%)	92.40	90.70	98.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	2,409,160,300	1,910,051,330	79.28	Badan Ketahanan Pangan
			Capaian Kinerja rata-rata			98.16	Capaian Kinerja rata-rata			79.28	Efisiensi
5	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1.	Persentase Angka Kelulusan								
			- SD/MI (%)	100	100	100.00	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	26,847,996,492	25,052,272,780	93.31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			- SMP/MTs (%)	100	100	100.00	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	11,947,400,000	11,813,061,400	98.88	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2	Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTS	95.45	97.3	101.94	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1,376,086,700	1,244,072,900	90.41	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		3	Angka melanjutkan dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA	77.79	86.02	110.58	Program Bantuan Operasional Sekolah	52,403,500,000	50,125,400,000	95.65	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							Program Pengembangan Minat Budaya Baca	1,114,656,550	1,031,730,649	92.56	Dinas Perpustakaan dan Arsip
							Program Pendidikan Anak Usia Dini	9,955,025,493	7,506,138,426	75.40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	177,565,500	152,220,975	85.73	Dinas Perpustakaan dan Arsip
			Capaian Kinerja rata-rata			103.13	Capaian kinerja rata-rata			90.28	Efisiensi
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.	Angka kematian ibu (per 1000 KH)	102	157.6	64.72	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	84,430,000	0.00	0.00	Dinas Kesehatan
		2.	Angka kematian bayi (per 1000 KH)	8	6.64	120.48	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	834,302,100	433,230,700	51.93	Dinas Kesehatan
		3.	Angka kematian anak balita (per 1000 kh)	1.07	0.68	157.35	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	398,444,000	273,727,350	68.70	Dinas Kesehatan
		4.	Angka Usia Harapan Hidup	70.46	70.36	99.86	Program Pengawasan Obat dan Makanan	215,605,000	209,543,000	97.19	Dinas Kesehatan

		5.	Prosentase gizi buruk (%)	0.42	0.19	221.05	Progran Obat dan Perbekalan Kesehatan	67,940,000	65,083,850	95.80	Dinas Kesehatan
							Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	2,580,604,850	1,503,704,274	58.27	Dinas Kesehatan
							Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringanya	16,094,254,882	11,696,821,579	72.68	Dinas Kesehatan
							Program Peningkatan Pelayanan Publik	453,056,500	447,340,631	98.74	Dinas Kesehatan
							Program Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelayanan Teknis	26,818,571,550	24,689,022,000	92.06	Dinas Kesehatan
							Program Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	3,686,158,984	3,057,516,150	82.95	Dinas Kesehatan
							Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	40,091,587,936	35,342,335,321	88.15	RSUD
							Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	32,255,741,725	29,304,735,101	90.85	RSUD
							Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	2,337,500,000	2,107,637,405	90.17	RSUD
							Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia	21,009,800	18,289,800	87.05	Dinas Kesehatan
							Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	2,298,984,000	1283198350	55.82	Dinas Kesehatan
							Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	11,040,000,000	11,002,257,000	99.66	Dinas Kesehatan
							Program Upaya Kesehatan Masyarakat	29,451,810,307	19,163,344,144	65.07	Dinas Kesehatan
							Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	199,975,700	175,329,500	87.68	Dinas Kesehatan
			Capaian Kinerja rata-rata			132.69	Capaian kinerja rata-rata			76.82	Efisiensi
7	Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	1.	Indeks Pembangunan Manusia	71.26	70.27	98.61	program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	2,011,143,500	1,985,754,960	98.74	Dinas Sosial
							Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	300,000,000	292,934,200	97.64	Dinas Sosial
							Program Pengembangan wilayah transmigrasi	23,425,000	12,070,000	51.53	Dinas Tenaga Kerja

							Program pelayanan Kesehatan penduduk miskin	1,513,285,500	1,224,486,975	80.92	Dinas Kesehatan
							Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	250,450,000	200,541,350	80.07	Dinas Sosial, Bagian Kesra
			Capaian Kinerja Rata-Rata			98.61	Capaian Kinerja Rata-Rata			81.78	Efisiensi
8	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat	1.	Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap total Desa	15.00%	15.04%	100.27	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	764,486,000	751,599,950	98.31	Dinas Pemasdes
							Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	470,095,000	450,141,000	95.76	Dinas Pemasdes
							Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	733,575,000	709,417,390	96.71	Dinas Pemasdes
							Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	266,300,000	254,592,000	95.60	Dinas Pemasdes
							Program peningkatan peran serta kepemudaan	644,320,000	616,131,000	95.63	Disparpora
							Program pembinaan dan pemasyarakatan Olah Raga	913,990,000	821,334,100	89.86	Disparpora
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	50,000,000	48,400,000	96.80	Disparpora
							Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	44,000,000	38,040,000	86.45	Disparpora
							Program Pengembangan Kawasan Keagamaan	3,199,050,000	3,012,724,900	94.18	Kesra
			Capaian Kinerja Rata-Rata			100.27	Capaian Kinerja Rata-Rata			40.81	Efisiensi
9	Meningkatnya Kesempatan Kerja	1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4.1	3.19	128.53	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	104,990,000	90,950,000	86.63	Dinas Tenaga Kerja
							Program Peningkatan Kesempatan Kerja	132,880,000	59,598,050	44.85	Dinas Tenaga Kerja
			Capaian Kinerja Rata-Rata			0.00	Capaian Kinerja Rata-Rata			65.74	Efisiensi

10	Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman	1.	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	0	0	100.00	Program Pengembangan Perumahan	1,600,164,140	1,505,452,291	94.08	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		2.	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	0	0.1	99.90	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	19,350,653,250	17,645,149,300	91.19	DPU dan Tata Ruang

							Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	214,950,000	194,980,044	90.71	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
							Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1,629,730,500	1,056,184,500	64.81	Dinas Kesehatan
			Capaian kinerja rata-rata			99.95	Capaian kinerja rata-rata			85.20	Efisiensi
11	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	1.	Persentase angka kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani	100	100	100.00	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	309,760,000	302,724,825	97.73	Dinas Pengendalian Penduduk KB P3A
		2	Indeks Pembangunan Gender	91.55	91.57	100.02	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak	421,930,000	344,304,600	81.60	Dinas Pengendalian Penduduk KB P3A
			Capaian kinerja rata-rata			100.00	Capaian kinerja rata-rata			89.67	Efisiensi
12	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	1.	Laju Pertumbuhan Penduduk	0.31%	0.28%	108.93	Program Keluarga Berencana	7,724,611,700	5,127,102,483	66.37	Dinas Pengendalian Penduduk KB P3A
							Program Kesehatan Reproduksi Remaja	150,000,000	125,050,000	83.37	Dinas Pengendalian Penduduk KB P3A
			Capaian Kinerja Rata-Rata			108.93	Capaian Kinerja Rata-Rata			74.87	Efisiensi
13	Meningkatnya perkembangan dan pelestarian budaya	1.	Jumlah Kelompok Seni	214	479	223.83	Program Pengembangan Nilai Budaya	1,475,075,000	1,412,895,000	95.78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2.	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	206	207	100.49	Program Perencanaan sosial dan Budaya	893,850,000	761,964,174	85.25	Bappeda
			Capaian kinerja rata-rata			162.16	Capaian kinerja rata-rata			90.51	Efisiensi
14	Meningkatnya Infrastruktur dan Penataan ruang	1	Persentase panjang jaringan jalan kondisi baik	50.3	64.91	129.05	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	71,137,089,063	65,167,651,390	91.61	DPU dan Tata Ruang
		2	Persentase jembatan kondisi baik (%)	94.8	93.97	99.12	Program rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan	15,424,340,000	13,746,289,997	89.12	DPU dan Tata Ruang
		3	Persentase Jalan Lingkungan Pemukiman Dalam Kondisi Baik	49.73	50.00	100.54	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	7,323,318,345	6,453,867,000	88.13	DPU dan Tata Ruang
							Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	1,550,000,000	1,060,158,750	68.40	DPU dan Tata Ruang
							Program peningkatan sarana dan sarana pemerintah	35,591,426,208	33,149,146,012	93.14	all
							Program Perencanaan Tata Ruang	61,500,000	45,292,400	73.65	DPU dan Tata Ruang
							Program Jasa Konstruksi	281,470,400	74,924,701	26.62	DPU dan Tata Ruang

							Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ	199,500,000	196,900,000	98.70	Dinas Perhubungan
							Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	4,522,000,000	3,931,039,750	86.93	DPU dan Tata Ruang
							Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	44,890,843,000	43,368,007,690	96.61	DPU dan Tata Ruang
							Program Pengendalian Banjir	7,641,450,000	7,613,378,400	99.63	DPU dan Tata Ruang
							Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	19,350,653,250	17,645,149,300	91.19	DPU dan Tata Ruang
			Capaian Kinerja Rata-Rata			109.57	Capaian Kinerja Rata-Rata			83.64	Efisiensi
15	Meningkatnya potensi kepariwisataan	1	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	0.04	0.04	100.00	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	3,503,320,000.00	3,423,251,200.00	97.71	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
							Program Pengembangan Kemitraan	669,300,000	668,020,000	99.81	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
							Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1,646,640,000	1,640,156,000	99.61	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
			Capaian Kinerja rata-rata			100.00	Capaian Kinerja rata-rata			65.84	Efisiensi
16	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas lingkungan Hidup (IKLH)	74.05%	75	98,7	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	3,082,156,300	1,676,038,681	54.38	Kantor Lingkungan Hidup
		2	Rasio ruang Terbuka Hijau	9.14	33.58	367	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	2,557,075,000	894,095,294	34.97	Kantor Lingkungan Hidup
							Program pengembangan kinerja pengolahan sampah	5,373,705,500	1,740,881,700	32.40	Kantor Lingkungan Hidup
							Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4,727,507,550	3,719,915,750	78.69	Kantor Lingkungan Hidup
			Capaian Kinerja rata-rata			100.00	Capaian Kinerja Rata-Rata			16.84	Efisiensi
17	Meningkatnya iklim pengembangan dunia usaha / investasi	1.	Jumlah Investor (PMDN/PMA)	420	428	101.90	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	245,000,000	242,944,220	99.16	DPMPTSP
		2	Jumlah Nilai Investasi (PMD/PMA)Rp	79,244,206,600	416,858,337,000	526.04	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	498,802,000	437,954,700	87.80	DPMPTSP
							Program pembinaan dan pengawasan Bidang pertambangan	94,000,000	92,000,000	97.87	DPMPTSP
							Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	14,839,879,300	14,362,373,222	96.78	DPMPTSP
							Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	638,000,000	594,527,500	93.19	Dinas Perhubungan

							Program pengendalian dan Pengamanan Lalulintas	856,350,000	699,749,000	81.71	Dinas Perhubungan
							Program peningkatan pelayanan angkutan	1,111,120,000	955,128,680	85.96	Dinas Perhubungan
			Capaian Kinerja Rata-Rata			313.97	Capaian Kinerja Rata-Rata			14.17	Efisiensi
18	Meningkatnya ketertiban dan keamanan masyarakat	1.	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda	100	85.71	85.71	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	995,700,000	926,243,000	93.02	Satpol PP
		2	Angka Kriminalitas	235	231.00	101.73	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	40,075,000	39,567,500	98.73	Satpol PP
							Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	45,930,000	34,055,000	74.15	Satpol PP
							Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	740,150,000	627,929,500	84.84	BPBD
							Program pengembangan wawasan kebangsaan	209,411,000	200,000,000	95.51	Bakesbangpoldagri
							Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsanaan	70,000,000	60,000,000	85.71	Bakesbangpoldagri
							Program pendidikan politik masyarakat	3,000,000,000	2,625,881,680	87.53	Bakesbangpoldagri
			Capaian Kinerja Rata-Rata			93.72	Capaian Kinerja Rata-Rata			13.29	Efisiensi
19	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, transparan dan akuntabel	1.	Predikat Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	B	BB	100	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2397113400	2307016750	96.24	BKD
		2.	Peringkat Nasional Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	24	41	58.54	Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	14,253,687,500	13,773,434,067	96.63	SETWAN
							Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	5,821,930,000	5,476,980,400	94.07	KECAMATAN/ ADPEM
							Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan	2,256,154,624	2,092,439,974	92.74	KECAMATAN/ ADPEM
							Program perencanaan pembangunan daerah	4,629,094,000	3,568,776,632	77.09	BAPPEDA
							Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2,814,911,400	2,277,530,410	80.91	Bagian Organisasi, inspektorat
							Program Perencanaan pembangunan ekonomi	1,241,500,000	1,062,006,890	85.54	BAPPEDA
							Program penelitian dan pengembangan	1,286,848,000	1,151,317,401	89.47	BAPPEDA
							Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	7,275,400,000	7,000,785,150	96.23	BPKAD,PUPR

							Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	8,763,345,600	8,126,582,000	92.73	all
							Program Pembangunan sistem pendaftaran tanah	78,100,000	32,178,850	41.20	Bag Adm Pembangunan
							Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	195,000,000	173,456,675	88.95	Dinas Perpustakaan Arsip
							Program penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip	218,046,000	216,810,000	99.43	Dinas Perpustakaan Arsip
							Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	30,000,000	25,000,000	83.33	Adm Pemerintahan
							Program peningktan pelayanan kedinasan kepala daera/ wakil kepala daerah	1,421,701,200	1,307,990,188	92.00	Setda
							Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	468,150,000	454,155,850	97.01	Dinas Pemdes
							Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten / kota	153,000,000	141,789,500	92.67	BPKAD
							Program penataan daerah otonomi baru	722,254,480	659,249,500	91.28	Bagian Organisasi, Adm Pemerintahan
							Program penataan peraturan perundang-undangan	1,023,000,000	948,771,104	92.74	Bagian Hukum
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2,252,555,000	1,384,431,228	61.46	Setwan, setda
							Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa	3,783,767,300	3,548,202,943	93.77	Diskominfo, HUMAS
							Program kerjasama informasi dengan mas	1,317,400,000	1,283,119,250	97.40	diskominfo
							Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	358,590,000	227,513,500.00	63.45	Diskominfo
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	35,591,426,208	33,149,146,012.00	93.14	ALL
							Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	205,400,000	141,163,229	68.73	Dinas Perkim
			Capaian Kinerja Rata-Rata			79.27	Capaian Kinerja Rata-Rata			86.33	Efisiensi
20	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	1.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarkat	82	77.76	94.83	Program Peningkatan kualitas pelayanan publik	450,940,000	356,307,000	79.01	Dinas Kesehatan
							program penatan administrasi kependudukan	4,415,548,150	4,122,492,700	93.36	Dispendukcapil
							Program pengembangan Data/ informasi/ statistik daerah	207,855,000	202,638,000	97.49	Diskominfo, Humas
							Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	153,150,000	140,450,000	91.71	Bagian Hukum
							proram fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	358,590,000	227,513,500	63.45	Diskominfo, Humas
			Capaian Kinerja Rata-Rata			94.83	Capaian Kinerja Rata-Rata			85.00	Efisiensi

BUPATI MADIUN

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

TAHUN ANGGARAN 2019

JL.ALUN-ALUN UTARA NO.1-3 MEJAYAN